



# LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

## TRIWULAN I TAHUN 2025



BAPPERIDA KOTA PALANGKA RAYA  
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Petunjuk-Nya sehingga Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2025 ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2025 ini disusun sebagai dokumen yang memberikan gambaran mengenai capaian keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen ini juga memuat perbandingan program kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2025 dengan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mengevaluasi *konsistensi* penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen anggaran serta capaian kinerja dan penyerapan dana program kegiatan yang dilaksanakan serta permasalahan pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Dalam Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan sehingga segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini selanjutnya.

Akhir kata dengan segala ketulusan hati, kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kerjasama semua pihak sehingga dokumen evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik.

Palangka Raya, April 2025

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Riset dan Inovasi  
Daerah Kota Palangka Raya,

**Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750317 199903 1 005

## DAFTAR ISI

### COVER

**KATA PENGANTAR** ..... i

**DAFTAR ISI** ..... ii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Dasar Hukum ..... 4

1.3. Maksud dan Tujuan ..... 6

1.4. Sistematika Penulisan..... 6

### **BAB II KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH 2024 – 2026 DAN TAHUNAN (RKPD 2025)**

2.1. Kebijakan RPD Tahun 2024 - 2026..... 7

2.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025..... 8

2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ..... 12

2.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... 12

2.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah  
Tahun 2025..... 13

2.3.3. Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Kota  
Palangka Raya 2025 ..... 14

2.4. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... 27

2.5. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... 37

2.6. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 ..... 39

### **BAB III EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025**

3.1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025..... 41

3.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan  
Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Urusan ..... 43

### **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan ..... 45

4.2. Rekomendasi..... 45



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan konsekuensi logis dari implementasi otonomi daerah, yang memiliki tujuan akhir mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Pemerintah daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, harus melaksanakan pembangunan yang mampu merespon kebutuhan masyarakatnya dan juga memberikan solusi atas berbagai akar permasalahan yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Penyelenggaraan pembangunan daerah harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian proses manajemen yang baik dan terukur, yang meliputi tahapan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah maka harus terjadi sinergitas dan kesesuaian antara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan perencanaan pembangunan tahunan. Selain itu, penyusunan perencanaan pembangunan harus mengacu pada data dan informasi permasalahan dan capaian pembangunan daerah, yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Penyediaan data dan informasi tersebut, disediakan melalui proses evaluasi yang menyeluruh dan komprehensif dengan memotret capaian berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai suatu rangkaian proses manajemen, maka evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah suatu hal yang wajib dilaksanakan, dalam rangka mengukur capaian keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Evaluasi pelaksanaan



rencana pembangunan daerah secara berkala dilaksanakan baik evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah maupun tahunan. Oleh karenanya, tujuan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai dokumen rencana pembangunan daerah tahunan adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dicapai, dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua (2) dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, sehingga arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah di tahun berkenaan menjadi dasar penentuan tema pembangunan RKPD yang selanjutnya diselaraskan dengan tema Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di tahun berkenaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat tema pembangunan yang dijabarkan ke dalam sasaran dan prioritas pembangunan. Sehingga RKPD Kota Palangka Raya tahun 2025 mencerminkan komitmen dan effort daerah dalam mewujudkan target capaian pembangunan tahun 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I Tahun 2025 oleh Bapperida Kota Palangka Raya, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, utamanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 294 Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya melakukan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang meliputi:

- a) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah serta Pagu Indikatif;
- b) Pengendalian pelaksanaan tersebut dilakukan melalui Pemantauan dan Supervisi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c) Pemantauan dan Supervisi harus dapat menjamin Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah serta Pagu Indikatif yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan Pedoman Penyusunan Rancangan KUA, PPAS dan APBD Kota;
- d) Hasil Pemantauan dan Supervisi tersebut digunakan utk mengevaluasi.

Selanjutnya dalam Pasal 305 disebutkan bahwa evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan untuk :

- a) Menilai realisasi antara rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b) Menilai realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c) Yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud uraian tersebut di atas dilaksanakan setiap



Triwulan di mana setiap perangkat kerja membuat laporan pelaksanaan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disampaikan ke Walikota Palangka Raya melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan Maret 2025. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun selanjutnya.

## **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana pembangunan



- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
  6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;
  7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
  8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14);
  9. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 15);
  10. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15);
  11. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 Nomor 18).



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan dari evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I Tahun 2025 adalah untuk melakukan evaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan pembangunan daerah, sebagai tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 :

- a. Mengevaluasi daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2024 dan RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026.
- b. Mensinkronkan program prioritas pembangunan sesuai kebutuhan riil Kota Palangka Raya dengan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Memperoleh gambaran capaian kinerja perangkat daerah lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya selama Tahun 2025 sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan laporan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan
- BAB II. Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026 Dan Tahunan (RKPD Tahun 2025)
- BAB III. Evaluasi Kinerja Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I Tahun 2025
- BAB IV. Penutup



## **BAB II**

### **KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KOTA PALANGKA RAYA 2024 – 2026 DAN TAHUNAN (RKPD TAHUN 2025)**

#### **2.1. Kebijakan RPD Tahun 2024 -2026**

RPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan, pelanggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam proses penyusunannya, RPD Kota Palangka Raya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional Tahun 2011-2031, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2035, dan RTRW Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039, serta Rancangan Revisi RTRW Kota Palangka Raya Tahun 2023-2043.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu RPD. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan arah kebijakan setiap tahun selama periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan tahunan memandu sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan, dan akan menjadi tema pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2025.



Tema Pembangunan Nasional, Kalimantan Tengah, dan Kota Palangka Raya disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1 Arah Kebijakan / Tema Pembangunan Tahun 2025**

<b>NASIONAL (RKP)</b>	<b>PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>KOTA PALANGKA RAYA</b>
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.	Memantapkan Pembangunan Melalui Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Menuju Kalteng Unggul dan Bermartabat.	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial untuk Membangun Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

## **2.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025**

Sasaran pembangunan Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2025-2045 berorientasi pada Visi Kota Palangka Raya yaitu **“Terwujudnya Kota Palangka Raya yang Semakin Maju, Berkelanjutan, dan Semakin KEREN (Kolaboratif, Ekonomi Maju, Religius, Energik dan Nyaman)”**.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya menuangkan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :



Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah	Formula	Kondisi Awal 2023	Target	
						2024	2025
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	Indeks Pembangunan Manusia	IPM Berdasarkan Data BPS	80,2	81,16	81,17
			Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah berdasarkan Data BPS	14,98	14,98	14,99
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan Data BPS	11,55	11,55	11,56
			Jumlah Prestasi Pemuda Kota Palangka Raya pada tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional	Jumlah Prestasi Pemuda Kota Palangka Raya pada tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional	50	50	60
		Meningkatnya Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup Berdasarkan data BPS	73,47	73,48	73,49
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan Berdasarkan data BPS	3,35	3,35	3,34
		Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan data BPS	5,71	5,64	5,6



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah	Formula	Kondisi Awal 2023	Target	
						2024	2025
2	Meningkatkan Kualitas Pariwisata	Meningkatnya Kualitas Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan Kota Palangka Raya (Wisman dan Wisnus)	377.077	395.931	415.727
			Jumlah event seni dan budaya	Jumlah event seni dan budaya yang dilaksanakan	5	6	7
3	Menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah Kecamatan yang berkelanjutan	Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial antar kecamatan	Perbedaan (deviasi) persentase penduduk miskin antar kecamatan		(2021) : 58,09	55,19	52,49
		Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial antar kecamatan	Indeks Aksesibilitas wilayah	Panjang jalan/luas wilayah	16:48	0,315	0,33
		Terjaganya kualitas lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	2022 : 73,97	73,98	73,99
4	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Data BPS	7,20	7,22	7,22
			Skor Pola Pangan Harapan	Angka Kecukupan Gizi (AKG) X Bobot Kelompok Pangan	90.6	91,6	95
		Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi PMDN			5,41	5,13



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Daerah	Formula	Kondisi Awal 2023	Target		
						2024	2025	
5	Meningkatnya Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat	Indeks Ketertiban dan Keamanan	= PPPD + IT/2	57,5	56,5	55,5	
			Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PPPD)		100	100	100	
			Indeks Toleransi		15	13	11	
6	Meningkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Berdasarkan Penilaian MenPan RB	C	BB	BB	
			OPINI BPK	Opini BPK Berdasarkan Penilaian BPK	WTP	WTP	WTP	
			Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Berdasarkan Penilaian Kemenpan RB	B	BB	BB	
			Indeks Profesionalisme ASN	Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019	Kategori Sangat Rendah	Kategori Sangat Rendah	Kategori Rendah	
			Indeks SPBE	Hasil Evaluasi SPBE dari KemenPan - RB	2,65	2,75	2,85	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD	90	90	90
			Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	IKM		B	B	B



### **2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025**

Guna mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan dan isu strategis sehingga diperlukan prioritas pembangunan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024- 2026 serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2019-2024 serta Rancangan RKP Tahun 2025 sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kota Palangka Raya tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2026, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

#### **2.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025**

Berikut adalah prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi



4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

### **2.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025**

Prioritas pembangunan Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2021-2026 dan Penyelarasan terhadap RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 dan diharapkan Juga selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang akan disusun oleh kepala Daerah Terpilih nantinya antara lain :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur mendukung penanganan pembangunan ekonomi untuk Kalteng Bermartabat
2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok
3. Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, mempercepat pemulihan ekonomi, peningkatan Koperasi



dan UMKM, peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan masyarakat untuk Kalteng Kuat

4. Mengoptimalkan penerapan e-government, peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi kalangan professional dan peningkatan intensif aparatur untuk Kalteng Amanah; dan
5. Memperkuat falsafah Huma Betang, menerbitkan peraturan dan hukum adat serta memperkuat kelembagaan adat untuk kalteng harmoni.

### **2.3.3. Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Kota Palangka Raya 2025**

Berikut adalah prioritas Pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2025 :

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pariwisata;
- 3) Menciptakan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan Yang Berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan Perekonomian Daerah;
- 5) Meningkatnya Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat;
- 6) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 disajikan dalam **Tabel 2.3.** berikut ini :



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Pelaksana
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas</b>				
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda</b>				
Pengelolaan Pendidikan	1. Menurunnya Angka Putus Sekolah 2. APK SD/MI 3. APM SD/ MI 4. Menurunnya Angka Putus SeKolah SD/MI	14,98	14,99	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Jumlah Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	40	50	Disparbudpora
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase Jumlah Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	30	50	
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan</b>				
Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	80,59	82,33	Dinas Kesehatan
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Presentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	50	52	Dinas DaldukKbP3APM
Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang mendapatkan penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu	95	97	
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)		700	800	
Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan Hukum	95	97	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Total Perteliti rat (TFR)	51,50	64,55	



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Pelaksana
Program Pengendalian Penduduk	1. Laju Pertumbuhan Penduduk 2. Presentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan ) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	18	16	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1. Angka Pemakaian Kopntarsepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun 2. Cakupan PKB/PLKB yang didaya gunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk 3. Cakupan PUS yang ingin Ber KB tapitidak terpenuhi (Unmeet ned) 4. Presentase Penggunaan Kontarsepsi Jangka Panjang (MKJP)	74,26	74,26	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	LPM/LKK aktif	149	155	
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat</b>				
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Terpebuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	100%	Dinas Sosial
Proram Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Anak Terlantar yang Terpelihara dengan Baik	85%	85%	
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya	100%	100%	



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Pelaksana
<b>Sasaran 4 : Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja</b>				
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Proyeksi Ketenagakerjaan yang Dimanfaatkan untuk Pengambilan Kebijakan Ketenagakerjaan	100%	100%	Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	65%	65%	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penurunan Angka Pengangguran Terbuka	2%	2%	
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak	75%	75%	
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pariwisata</b>				
<b>Sasaran 5 : Meningkatnya Sektor Pariwisata dan Kebudayaan</b>				
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Budaya Serta Pelaku dan Pengelola Budaya Dalam Pelestrarian dan Pemanjuaan Kebudayaan	5	7	Disparbudpora
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Dengan Infrastruktur yang Berkwalitas dan Memadai	2	2	
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	377.077	415.727	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peningkatan Pelaku Usaha dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	60	65	
<b>Tujuan 3 : Menciptakan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan Yang Berkelanjutan</b>				
<b>Sasaran 6 : Terwujudnya pemerataan infrastruktur ekonomi maupun sosial antar kecamatan</b>				
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	64,5	66,0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Pelaksana
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	61,5	62,5	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Panjang Kanal Banjir Dalam Kondisi Baik	48	49	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	97	98	
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Prasarana Persampahan yang Terkelola dengan Baik	71	72	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Limbah Domestik yang Layak	86	88	
Program Pengembangan Permukiman		80	85	
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pertek yang Dikeluarkan dan SLF yang Diterbitkan	100	100	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyelenggara Jasa Kontruksi yang Dibina	78	79	
Program Kawasan permukiman	Persentase Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman	15,057	12,057	
Program Kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni di Kawasan Kumuh	92,73	96,73	
Program prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman Yang di Dukung PSU	51,48	56,48	
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Level Keselamatan Transportasi	0,195	0,195	Dinas Perhubungan
Program pengelolaan pelayaran	Jumlah Arus Penumpang melalui Dermaga	55,255	53,000	



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Pelaksana
<b>Sasaran 7 : Terjaganya kualitas lingkungan hidup</b>				
Program perencanaan lingkungan hidup				Dinas Lingkungan Hidup
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				
Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)				
Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)				
Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pph				
Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat				
Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat				
Program penanganan pengaduan lingkungan hidup				
Program pengelolaan persampahan				
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		75,5	76,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program penyelesaian sengketa tanah garapan		44,76	58,2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penyelesaian Ganti		70	75	



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Pelaksana
Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan				
Program Pengelolaan Tanah Kosong		23,6	24,2	
Program penanggulangan bencana		100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran		70	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
<b>Tujuan 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah</b>				
<b>Sasaran 8 : Meningkatkan Perekonomian Sektor Strategis</b>				
Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan		90,6	95	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan				
Program Pengawasan Keamanan Pangan				
Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		1247,67	1301,1	
Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		22,7	22,7	
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
Program Perijinan Usaha Pertanian				
Program Penyuluhan Pertanian				
Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		6792530	7488764,85	



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Pelaksana
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		5752,41	6251,71	Dinas Perikanan
Program Pengeloaan Perikanan Budidaya		27.231	30.165,14	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		64,3	71,22	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		25,00	28,00	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		12,12	13,55	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, Perindustrian
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		4	7	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		15	50	
Program Pengembangan UMKM		20	30	
<b>Sasaran 9 : Meningkatkan Investasi Daerah</b>				
Pengembangan Iklim Penanaman Modal		50%	20%	DPM PTSP
Promosi Penanaman Modal		35%	20%	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		45%	30%	
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		100%	100%	
Program Pelayanan Penanaman Modal		81,5	83	
<b>Tujuan 5 : Meningkatkan Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat</b>				
<b>Sasaran 10 : Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat</b>				



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Pelaksana
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelanggaran K3	500	450	Satpol PP
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah anak bangsa yang sudah mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa	250	300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase penyaluran dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik	10	10	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah kota Palangka Raya	90%	95%	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1. Jumlah kegiatan FKUB 2. persentase tingkat keberhasilan kelurahan bersinar	4	5	
<b>Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</b>				
<b>Sasaran 11 : Meningkatkan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berintegritas</b>				
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan (IPK)	80%	85%	BPKAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	80%	85%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	B	BB	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Pelaksana
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	95%	95%	Sekretariat DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis DPRD	95%	95%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	95%	100%	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	85%	85%	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah	Level 3	Level 3	
Program Kepegawaian Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Data Pegawai yang Akurat</li> <li>Persentase Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan III ke bawah</li> <li>Persentase Pejabat sesuai dengan Kompetensi dan Syarat Jabatan</li> </ol>			BKPSDM
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat Yang Memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan Tingkat Jabatan			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		B	B	BPPRD
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Pendapatan Daerah yang Berorientasi pada Pelayanan Publik Berkualitas	81,50%	81,50%	



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Pelaksana
Aplikasi Informatika	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi	86%	95%	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
Informasi dan Komunikasi Publik	1. IKM Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 2. Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan KIM (Komunitas Informasi Masyarakat) Tingkat Kecamatan	80 (indeks)	82 (indeks)	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data	100%	100%	
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	42%	47%	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	BB	BB	
<b>Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah</b>				
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	85%	90%	Bapperida
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1. Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD 2. Nilai Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya Hasil Evaluasi Kemenpan-RB 3. Level Maturitas SPIP	85%	90%	
Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	100%	



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Pelaksana
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	BB	BB	
<b>Sasaran 13 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas</b>				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	81,50	89	Kec. Sabangau
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	70,51	81,5	Kec. Jekan Raya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			Kec. Rakumpit
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	A (90)	A (92)	Kec. Bukit Batu
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,30 / A	81,40 / A	Kec. Pahandut
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Memadai	A	A	Disdukcapil
Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga 2. Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata 3. Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL			



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2025	Pelaksana
Program Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian</li> <li>2. Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting</li> <li>3. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun</li> </ol>			
Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	85,41	88	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah Terlaksanannya Pelestarian naskah kuno dan koleksi Budaya etnis Nusantara	1	1	
Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip	18	36	
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase SOPD yang sudah melaksanakan program perlindungan dan penyelamatan Arsip	18	36	



#### **2.4. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pemenuhan aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan harus menjadi subjek penerima terbesar manfaat dari pembangunan yang ada di Kota Palangka Raya.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu pada sasaran pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKD)**

NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	14,98	14,98	14,99	Dinas Pendidikan
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,55	11,55	11,56	
2	Meningkatnya prestasi Pemuda Kota Palangka Raya pada tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional	Jumlah Prestasi Pemuda Kota Palangka Raya pada tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional	0	50	60	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI) per-100.000 KH	55	53	50	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB) per-1.000 KH	4	4	4	
4	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,63	95,67	95,78	Dinas Dalduk KBP3APM
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	85,40	85,94	85,96	
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3%	3,60%	3,70%	
5	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	92%	93%	93,50%	
6	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	56,1	65,59	67,55	



NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
		Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	95%	95,65%	96,76%	
7	Meningkatkan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	51,50	64,55	64,55	
		Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2,00	2,00	1,96	
		Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	34,60	18	16	
8	Meningkatnya akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Contraceptive (mPCR)	85,5	74,26	74,26	
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	6,37%	5%	5,01%	
9	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK Aktif	36	36	36	
		Jumlah Posyandu Aktif	143	149	150	
10	Meningkatnya Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) agar berfungsi sosial	Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	3,2%	3,5%	3,7%	Dinas Sosial
11	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap	54%	52%	53%	Dinas Tenaga Kerja
		Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 88.592.461,-	Rp. 83.181.905,-	Rp. 84.845.544,-	
		Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	92%	85%	90%	



NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
12	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kasus Yang Diselesaikan	70%	70%	70%	
13	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah kunjungan Wisatawan	70%	70%	70%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah event seni dan budaya		5	6	
14	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar	Indeks Kualitas Infrastruktur KePu an (IKPU)	67	67	68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Meningkatnya kualitas permukiman	Indeks kualitas permukiman	47,44	56,69	57,94	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Transfortasi)	80	80	80	Dinas Perhubungan
17	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	54	52,9	53	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	90,82	84,77	84,87	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	79,81	78,18	78.80	
18	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	0	78	79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	Persentase bidang tanah yang bersertifikat	46,12	46,12	52,46	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
20	Terwujudnya masyarakat yang Tangguh	Persentase kelurahan tangguh bencana	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran dan penyelamatan	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi dalam tingkat waktu tanggap (response time)	70	74	78	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
22	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor PPH	90,6	91,6	95	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23	Meningkatnya Pertumbuhan Produksi Pertanian	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.247,67	1.301,10	1.301,10	
		Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan	22,70	22,70	22,70	
23	Meningkatnya Pertumbuhan Produksi Pertanian	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	6.792.530	7.132.157	7.488.765	
24	Meningkatnya Perekonomian Sektor Perikanan	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Perikanan	4,17	4,42	4,92	Dinas Perikanan
25	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Perdagangan	12,12	12,45	13,55	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, Perindustrian
26	Meningkatnya Pertumbuhan Omset IKM	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	4,00	5,00	7,00	
27	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	15,00	25,00	50,00	
28	Meningkatnya Daya Saing UKM	Persentase UMK yang Naik kelas	20,00	25,00	30,00	



NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
29	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	350 Milyard	370 Milyard	390 Milyard	DPM PTSP
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5	82	83	
30	Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Penegakan Peraturan Daerah Serta Perlindungan Masyarakat		500	475	450	Satpol PP
31	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Peringkat Nasional Angka Indeks Toleransi	15	13	11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	80%	80%	85%	BPKAD
33	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Nilai SAKIP	B	BB	BB	Sekretariat Daerah
34	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
35	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja dalam Mendukung Pelaksanaan Tri Fungsi DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah	96%	95%	96%	Sekretariat DPRD
36	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Tri Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	95%	96%	96%	



NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
37	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat SAKIP "B"	90%	100%	100%	Inspektorat
38	Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di tindak lanjuti	85%	85%	85%	
		Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara	80%	80%	80%	
39	Meningkatnya Implementasi SPIP	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	
		Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	
40	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Indeks Sistem Merit	Kategori II (Kurang)	Kategori II (Kurang)	Kategori III (Baik)	BKPSDM
41	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Kategori Sangat Rendah	Kategori Sangat Rendah	Kategori Rendah	
42	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Prosentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah	100	100	100	BPPRD
43	Meningkatnya Pengembangan E-Government menuju Palangka Raya Kota Sejahtera	Indeks SPBE	2,65	2,75	2,85	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
44	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi	Persentase Wilayah (Kelurahan) yang terkoneksi Jaringan Internet	73	76	80	



NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
45	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD	90%	90%	91%	Bapperida
		Persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA	90%	90%	91%	
46	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase realisasi capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target	90%	90%	90%	
47	Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD yang memiliki perencanaan yang baik	90%	90%	90%	
48	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase hasil litbang yang termanfaatkan	100%	100%	100%	
49	Meningkatnya Mutu Pelayanan di Kecamatan	Akumulasi Nilai IKM dari Program yang dilaksanakan di Kecamatan pada tahun berkenaan	81,50	88,31	89	Kec. Sabangau
50	Meningkatnya Mutu Pelayanan di Kecamatan	IKM Kecamatan	B	B	B	Kec. Jekan Raya
51	Meningkatnya Mutu Pelayanan di Kecamatan	IKM Kecamatan	83 / A	83,5 / A	84 / A	Kec. Rakumpit
52	Meningkatnya Mutu Pelayanan di Kecamatan	IKM Kecamatan	A (90)	A (91)	A (92)	Kec. Bukit Batu
53	Meningkatnya Mutu Pelayanan di Kecamatan	IKM Kecamatan	81,30 / A	81,35 / A	81,40 / A	Kec. Pahandut
54	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk)	B	A	A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
55	Penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota dalam 1 Tahun	Persentase berdasarkan cakupan penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota dalam satu tahun	100	100	100	
56	Pemanfaatan Data Kependudukan (oleh OPD)	Persentase OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	80	90	100	
57	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	Persentase berdasarkan cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	98	99	100	
58	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persentase berdasarkan kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian	100	100	100	
59	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase berdasarkan yang dilaporkan diberikan akta perkawinan	100	100	100	
60	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian dilaporkan	Persentase berdasarkan yang dilaporkan diberikan akta perceraian	100	100	100	



NO	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
61	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perpustakaan dan Meningkatnya Tertib Arsip pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Akumulasi Nilai IKM	85,41	86	88	Perpustakaan dan Kearsipan
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kota Palangka Raya	D	C	B	



## 2.5. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Dengan kata lain, analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Penilaian ini dilakukan melalui indikator makro ekonomi daerah, apakah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah.

Analisis kinerja ekonomi makro akan memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Kota Palangka Raya, sehingga hal tersebut sangat penting dalam merumuskan budget policy. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya selain dipengaruhi oleh keadaan internal Kota Palangka Raya juga dipengaruhi oleh arah kebijakan provinsi Kalimantan Tengah dan ekonomi secara nasional. Adapun kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh penetapan indikator kinerja daerah tahun 2025 yang disesuaikan dengan:

- RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 dimana target pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2025 tumbuh sebesar 7,22 persen, angka kemiskinan 3,35 persen, Indeks Gini sebesar 0,318 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 81,16.
- Penetapan indikator kinerja daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80 persen,



angka kemiskinan sebesar 4,66 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,90 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,42 persen dan indeks Gini sebesar 0,31.

Selain diatas, kondisi ekonomi Kota Palangka Raya secara eksternal akan dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi nasional dan perkembangan ekonomi global.

- Pada tahun 2025 Pemerintah telah menargetkan sasaran ekonomi nasional sebagai berikut diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,6 persen; angka kemiskinan sebesar 7,8 - 8,0 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5 - 5,0 persen, indeks modal manusia sebesar 0,56 dan gini rasio sebesar 0,379 - 0.382 persen.

Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, strategis ekonomi domestik akan lebih diutamakan dengan prioritas pada kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi serta upaya untuk mendorong industri pengolahan dan pariwisata. Langkah-langkah tersebut akan didukung dengan upaya perwujudan kedaulatan keuangan yang ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur mendukung penanganan pembangunan ekonomi untuk Kalteng Bermartabat; Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertikat masyarakat adat untuk kalteng Elok; Mempercepat pengembangan kawasan industri, ekonomi dan food estate, mempercepat pemulihan ekonomi, peningkatan koperasi dan UMKM, peningkatan pendidikan dan peningkatan kesehatan masyarakat untuk Kalteng Kuat;



Mengoptimalkan penerapan e- government, peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi kalangan profesional dan peningkatan intensi aparatur untuk Kalteng Amanah; Memperkuat falsafah huma betang, menerbitkan peraturan dan hukum adat memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.

## **2.6. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025**

Program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025 merupakan substansi RKPD Kota Palangka Raya. Daftar yang disajikan meliputi nama program dan kegiatan yang diwujudkan dalam jumlah dana yang dibutuhkan, target dari pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan untuk RKPD 2025 Kota Palangka Raya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk penyelesaian target-target pembangunan Nasional;
2. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya;
3. Fokus pada pencapaian RPJPD 2025 – 2045 dan Indikator Kinerja RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026;
4. Mempercepat pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah;
5. Pemerataan antar kecamatan dan atau kelurahan;
6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
7. Mempercepat penyelesaian masalah sosial, ekonomi, politik serta hukum;
8. Program dan kegiatan terpilih menyentuh langsung bagi upaya pemecahan masalah mendasar yang dihadapi masyarakat.



RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 sehingga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rincian **Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025** adalah sebagai berikut:



**KOTA PALANGKARAYA**  
**SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM**  
**PRIORITAS KABUPATEN/KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	41.583.000,00	0,00	0,00	0,00	41.583.000,00
2	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1.076.682.600,00	2.730.000,00	0,00	0,00	1.079.412.600,00
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
4	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	19.999.800,00	0,00	0,00	0,00	19.999.800,00
5	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	125.575.000,00	0,00	0,00	0,00	125.575.000,00
6	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	88.090.000,00	0,00	0,00	0,00	88.090.000,00
7	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	49.999.900,00	0,00	0,00	0,00	49.999.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
8	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	57.650.000,00	40.080.000,00	0,00	0,00	97.730.000,00
9	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	11.789.355.409,00	144.284.400,00	0,00	0,00	11.933.639.809,00
10	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	1.377.401.300,00	19.198.800,00	0,00	0,00	1.396.600.100,00
11	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	491.317.200,00	0,00	0,00	0,00	491.317.200,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
12	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	57.252.000,00	10.668.000,00	0,00	0,00	67.920.000,00
13	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2.708.214.338,00	0,00	0,00	0,00	2.708.214.338,00
14	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.495.140.400,00	4.953.000.000,00	0,00	0,00	8.448.140.400,00
15	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.344.333.600,00	1.364.650.000,00	0,00	0,00	2.708.983.600,00
16	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.780.214.800,00	49.906.984.930,00	0,00	0,00	52.687.199.730,00
17	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.035.164.204,00	1.192.503.900,00	0,00	0,00	13.227.668.104,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
18	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.893.360.400,00	0,00	0,00	0,00	4.893.360.400,00
19	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial	402.800.000,00	0,00	0,00	0,00	402.800.000,00
20	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	206.855.000,00	0,00	0,00	0,00	206.855.000,00
21	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial	2.810.863.800,00	3.158.517.400,00	0,00	0,00	5.969.381.200,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
22	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	1.845.890.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	1.875.890.000,00
23	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	649.237.000,00	0,00	0,00	0,00	649.237.000,00
24	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan	75.970.000,00	10.430.000,00	0,00	0,00	86.400.000,00
25	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan	13.666.436.638,00	1.886.726.600,00	0,00	0,00	15.553.163.238,00
26	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	22.955.202.475,00	2.011.463.900,00	0,00	0,00	24.966.666.375,00
27	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan	750.923.000,00	0,00	0,00	0,00	750.923.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
28	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Perikanan	2.055.815.100,00	155.600.000,00	0,00	0,00	2.211.415.100,00
29	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Perikanan	1.350.435.200,00	0,00	0,00	0,00	1.350.435.200,00
30	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Perikanan	414.999.600,00	0,00	0,00	0,00	414.999.600,00
31	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perikanan	6.421.910.088,00	22.446.000,00	0,00	0,00	6.444.356.088,00
32	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29.999.900,00	0,00	0,00	0,00	29.999.900,00
33	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.624.800,00	0,00	0,00	0,00	42.624.800,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
34	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	234.861.900,00	0,00	0,00	0,00	234.861.900,00
35	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	614.309.260,00	154.348.929,00	0,00	0,00	768.658.189,00
36	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	711.801.200,00	0,00	0,00	0,00	711.801.200,00
37	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	13.493.298.590,00	389.194.000,00	0,00	0,00	13.882.492.590,00
38	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	178.000.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000.000,00
39	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.111.802.436,00	41.907.000,00	0,00	0,00	2.153.709.436,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
40	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	231.100.000,00	0,00	0,00	0,00	231.100.000,00
41	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	681.113.000,00	0,00	0,00	0,00	681.113.000,00
42	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja	271.000.000,00	0,00	0,00	0,00	271.000.000,00
43	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	426.371.359,00	0,00	0,00	0,00	426.371.359,00
44	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	212.950.622,00	0,00	0,00	0,00	212.950.622,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
45	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tenaga Kerja	360.175.291,00	127.752.000,00	0,00	0,00	487.927.291,00
46	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
47	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	324.200.000,00	0,00	0,00	0,00	324.200.000,00
48	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	3.074.239.326,00	112.890.000,00	0,00	0,00	3.187.129.326,00
49	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	12.438.317.583,00	304.443.000,00	0,00	0,00	12.742.760.583,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
50	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	8.610.914.539,00	305.722.400,00	0,00	0,00	8.916.636.939,00
51	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00
52	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	506.118.250,00	86.124.000,00	0,00	0,00	592.242.250,00
53	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tenaga Kerja	223.463.900,00	0,00	0,00	0,00	223.463.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
55	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	335.000.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000.000,00
56	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	2.303.838.000,00	0,00	0,00	0,00	2.303.838.000,00
57	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	3.915.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.915.000.000,00
58	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	2.030.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.300.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
59	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	228.693.000,00	0,00	0,00	0,00	228.693.000,00
60	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	80.790.400,00	0,00	0,00	0,00	80.790.400,00
61	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	412.201.900,00	0,00	0,00	0,00	412.201.900,00
62	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	7.693.610.271,00	1.757.584.600,00	0,00	0,00	9.451.194.871,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
63	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	427.686.200,00	0,00	0,00	0,00	427.686.200,00
64	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	218.365.000,00	0,00	0,00	0,00	218.365.000,00
65	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat	12.601.261.101,00	1.956.203.200,00	0,00	0,00	14.557.464.301,00
66	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	2.369.380.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	2.379.380.000,00
67	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	2.434.392.400,00	0,00	0,00	0,00	2.434.392.400,00
<b>TOTAL</b>					<b>176.815.852.080,00</b>	<b>70.155.453.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.971.305.139,00</b>



### BAB III

## EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

### 3.1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Status penilaian kinerja dan realisasi anggaran berdasarkan

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Status
1	91 % ≤ 100 %	Sangat tinggi (ST)
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi (T)
3	66 % ≤ 75 %	Sedang (S)
4	51 % ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 50 %	Sangat Rendah (SR)

Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Pada Triwulan I Tahun anggaran 2025 Capaian Kinerja Kota Palangka Raya dikategorikan Sangat Rendah, hal ini dapat dilihat dari realisasi kinerja yang mencapai 17,21 %, dengan realisasi anggaran sebesar 12,75 %. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 3.1.**  
**Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025**

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025	
		Rp	K	Rp	K
1	Dinas Pendidikan	12,45	18,05	SR	SR
2	Dinas Kesehatan	13,73	16,85	SR	SR
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,14	5,38	SR	SR



NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025	
		Rp	K	Rp	K
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5,86	8,58	SR	SR
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16,62	16,79	SR	SR
6	Satuan Polisi Pamong Praja	27,84	29,08	SR	SR
7	Dinas Sosial	10,82	25,05	SR	SR
8	Dinas Tenaga Kerja	22,03	24,46	SR	SR
9	Dinas Lingkungan Hidup	20,2	20,78	SR	SR
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28,36	32,06	SR	SR
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	6,81	20,46	SR	SR
12	Dinas Perhubungan	21,11	23,07	SR	SR
13	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian	10,05	14,92	SR	SR
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19,79	21,8	SR	SR
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	17,4	19,33	SR	SR
16	Dinas Perikanan	14,81	27,3	SR	SR
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)	9,66	25,93	SR	SR
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19,39	20,26	SR	SR
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)	21,76	25,1	SR	SR
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16,4	20,15	SR	SR
21	Sekretariat Daerah	15,06	20,78	SR	SR
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14,33	23,36	SR	SR
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16,31	35,71	SR	SR



NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 ( % )		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025	
		Rp	K	Rp	K
24	Inspektorat Kota	12,13	13,54	SR	SR
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	6,08	11,26	SR	SR
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	10,87	12,83	SR	SR
27	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	19,75	23,08	SR	SR
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19,43	22,13	SR	SR
29	Kecamatan Pahandut	17,44	18,87	SR	SR
30	Kecamatan Bukit Batu	14,64	18,6	SR	SR
31	Kecamatan Jekan Raya	19,05	21,62	SR	SR
32	Kecamatan Sabangau	16,72	21,12	SR	SR
33	Kecamatan Rakumpit	15,03	16,8	SR	SR
	<b>Total</b>	12,75	17,21	<b>SR</b>	<b>SR</b>

### 3.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Urusan

Program prioritas pembangunan selanjutnya dijabarkan dengan program pembangunan sesuai dengan organisasi dan satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan disertai dengan kebutuhan pendanaan. Skala prioritas tersebut mencakup bidang-bidang yang ada dalam organisasi perangkat daerah. Pemerintah kota Palangka Raya mempunyai target



pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2025 pertriwulan yaitu Triwulan I minimal sebesar 20 %, Triwulan II sebesar 50 %, Triwulan III sebesar 80 %, Triwulan IV sebesar 100%.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 terdapat dalam lampiran.

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025  
 TRIWULAN I  
 KOTA PALANGKARAYA

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab		
		5		6		7		8		9		10		11		12		13=12x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
<b>Semua Bidang</b>																										
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	95,00	38.291.930.724	100,00	-	100	8.681.876.563	2.017.140.062	-	-	-	-	-	-	-	2.017.140.062	0,00%	23,23%	-	-	2.017.140.062	-	5,27%	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			108.751.738	-	-	31.902.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.927.986.113	-	-	7.087.877.786	-	1.699.883.500	-	-	-	-	-	-	-	1.699.883.500	23,98%	-	-	1.699.883.500	-	14,59%	-	-		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.280.800	-	-	4.164.300	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	400.000	9,61%	-	-	400.000	-	3,14%	-	-		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			989.846.681	-	-	251.619.494	-	50.400.000	-	-	-	-	-	-	-	50.400.000	20,03%	-	-	50.400.000	-	13,49%	-	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.046.588.966	-	-	278.654.000	-	97.229.558	-	-	-	-	-	-	-	97.229.558	34,89%	-	-	97.229.558	-	24,58%	-	-		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.589.883.850	-	-	415.208.200	-	127.750.000	-	-	-	-	-	-	-	127.750.000	30,77%	-	-	127.750.000	-	16,23%	-	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			977.320.826	-	-	263.152.483	-	27.030.728	-	-	-	-	-	-	-	27.030.728	10,27%	-	-	27.030.728	-	8,91%	-	-		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.626.271.750	-	-	349.298.100	-	14.446.276	-	-	-	-	-	-	-	14.446.276	4,14%	-	-	14.446.276	-	6,35%	-	-		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																	73,13%	23,23%								
<b>Predikat Kinerja</b>																	sedang	Sangat Rendah								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	22.948.941.552	100,00	-	0	5.478.261.452	1.605.057.557	-	-	-	-	-	-	-	1.605.057.557	0,00%	29,30%	NAN	1.605.057.557	-	6,99%	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)		368.338.196	0,00	-	6	56.067.000	1	2.400.000	-	-	-	-	-	1	2.400.000	16,67%	4,28%	0,00	2.400.000	0,00%	0,65%	-	-		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu) (%)		15.302.075.680	0,00	-	0	3.568.022.876	-	940.827.325	-	-	-	-	-	-	940.827.325	0,00%	26,37%	0,00	940.827.325	0,00%	10,03%	-	-		
	Pembayaran Gaji ASN dan Penyusunan Laporan Keuangan (Bulan)			0,00	-	30	30	8	-	-	-	-	-	-	8	-	25,00%	-	0,00	-	0,00%	-	-	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah) (%)		2.137.928.980	0,00	-	100	236.819.764	100	34.763.100	-	-	-	-	-	25	34.763.100	25,00%	14,68%	0,00	34.763.100	0,00%	2,99%	-	-		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu) (%)		1.087.642.396	0,00	-	100	526.071.600	100	473.549.000	-	-	-	-	-	100	473.549.000	100,00%	90,02%	0,00	473.549.000	0,00%	19,52%	-	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) (%)		3.162.240.000	0,00	-	100	692.790.212	100	113.983.382	-	-	-	-	-	25	113.983.382	25,00%	16,45%	0,00	113.983.382	0,00%	9,32%	-	-		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhnya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKP/BMD (%)		890.716.300	0,00	-	100	398.490.000	100	39.534.750	-	-	-	-	-	25	39.534.750	25,00%	9,92%	0,00	39.534.750	0,00%	12,61%	-	-		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																	28,51%	29,30%								
<b>Predikat Kinerja</b>																	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	27.762.696.142	100,00	-	100	6.477.857.207	1.468.224.151	-	-	-	-	-	-	100	1.468.224.151	100,00%	22,67%	-	1.468.224.151	-	5,29%	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan/ Dokumen)		351.931.442	0,00	-	22	9.730.220	4	-	-	-	-	-	-	4	-	18,18%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	-	-		



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab			
Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah			15.409.752.000				2.995.697.440								506.942.684					16,92%		506.942.684		6,70%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah			3.819.817.500				1.019.767.500								149.214.200					14,63%		149.214.200		22,34%	
					</																				



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	25,66%							
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	45.342.705.266	100,00	100	11.812.697.064	2.173.015.554	-	-	-	-	-	-	2.173.015.554	0,00%	18,40%	2.173.015.554	0,00%	4,79%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	713.612.243	0,00	-	12	63.397.724	4	17.778.500	-	-	-	-	4	17.778.500	33,33%	28,04%	0,00	17.778.500	0,00%	8,36%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Laporan)	32.901.887.791	0,00	-	12	6.886.450.634	3	1.607.041.483	-	-	-	-	3	1.607.041.483	25,00%	23,34%	0,00	1.607.041.483	0,00%	7,92%		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (Laporan)	153.433.200	0,00	-	12	18.584.500	3	-	-	-	-	-	3	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Data Umum Kepegawaian Perangkat Daerah (Laporan/Dokumen)	272.725.000	0,00	-	12	18.900.000	3	-	-	-	-	-	3	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah (%)	4.394.053.810	0,00	-	1	970.658.414	1	144.700.690	-	-	-	-	0	144.700.690	25,00%	14,91%	0,00	144.700.690	0,00%	27,73%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan (Unit)	473.120.000	0,00	-	2	248.946.000	1	-	-	-	-	-	1	-	50,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Belanja Barang dan Jasa (%)	1.672.298.222	0,00	-	100	609.472.292	100	71.583.306	-	-	-	-	25	71.583.306	25,00%	11,75%	0,00	71.583.306	0,00%	17,51%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	4.761.575.000	0,00	-	1	2.996.287.500	1	331.911.575	-	-	-	-	0	331.911.575	25,00%	11,08%	0,00	331.911.575	0,00%	31,38%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		18,85%	18,40%							
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	74.326.853.950	100,00	100	14.456.419.772	2.943.397.993	-	-	-	-	-	100	2.943.397.993	100,00%	20,36%	2.943.397.993	0,00%	3,96%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	523.511.868	0,00	-	1	52.503.200	1	7.700.000	-	-	-	-	1	7.700.000	100,00%	14,67%	0,00	7.700.000	0,00%	5,07%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		52.972.412.670	-	-	-	10.558.086.436	2.623.196.030	-	-	-	-	-	2.623.196.030	24,85%		2.623.196.030	28,36%					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.221.177.500	-	-	-	429.156.000	41.480.000	-	-	-	-	-	41.480.000	9,67%		41.480.000	8,92%					
Administrasi Umum Perangkat Daerah		8.298.766.514	-	-	-	641.710.800	30.494.022	-	-	-	-	-	30.494.022	4,75%		30.494.022	1,80%					
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		173.440.000	-	-	-	126.720.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		-	0,00%					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.995.255.439	-	-	-	1.328.362.136	46.782.941	-	-	-	-	-	46.782.941	3,52%		46.782.941	3,57%					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.142.289.959	-	-	-	1.319.881.200	193.745.000	-	-	-	-	-	193.745.000	14,68%		193.745.000	11,64%					
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		16,72%	20,36%							
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	44.836.273.949	0,00	0	11.068.851.530	1.927.687.414	-	-	-	-	-	100	1.927.687.414	0,00%	17,42%	1.927.687.414	0,00%	4,30%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (12 Dokumen)	898.168.048	0,00	-	12	82.181.400	3	16.092.310	-	-	-	-	3	16.092.310	25,00%	19,58%	0,00	16.092.310	0,00%	2,83%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1)	30.907.486.034	0,00	-	1	7.812.671.844	1	1.514.857.928	-	-	-	-	1	1.514.857.928	100,00%	19,39%	0,00	1.514.857.928	0,00%	6,05%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya yang disiplin dan berkapasitas (%)	140.150.000	0,00	-	1	8.000.000	1	-	-	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab						
			2023	2024	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Telaksananya Pelayanan Administrasi Umum (Persen)	3.610.730.336	0,00	-	1	521.370.267	1	27.627.480	-	-	-	-	1	27.627.480	100,00%	5,30%	0,00	27.627.480	0,00%	6,36%								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan jasa perangkat daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai (% 100 %)	6.962.955.481	0,00	-	60	2.057.289.019	60	304.632.696	-	-	-	-	60	304.632.696	100,00%	14,81%	0,00	304.632.696	0,00%	7,51%								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Ukuran Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPMD (Persen)	2.316.784.050	0,00	-	1	587.339.000	1	64.477.000	-	-	-	-	1	64.477.000	100,00%	10,98%	0,00	64.477.000	0,00%	39,20%								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														28,65%	17,42%													
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah													
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	12,00	48.205.301.908	12,00	0	9.170.875.279	1.976.008.673	-	-	-	-	-	100	1.976.008.673	0,00%	21,55%		1.976.008.673	4,10%		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	124.346.700	0,00	-	12	12.094.800	3	-	-	-	-	-	3	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (bulan)	28.285.058.115	0,00	-	12	6.511.817.965	3	1.529.461.970	-	-	-	-	3	1.529.461.970	25,00%	23,49%	0,00	1.529.461.970	0,00%	6,10%								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (bulan)	757.386.500	0,00	-	12	155.891.000	3	-	-	-	-	-	3	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (bulan)	9.958.941.919	0,00	-	12	505.234.981	3	154.397.944	-	-	-	-	3	154.397.944	25,00%	30,56%	0,00	154.397.944	0,00%	3,93%								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	5.354.984.768	0,00	-	12	1.625.878.200	3	150.977.759	-	-	-	-	3	150.977.759	25,00%	9,29%	0,00	150.977.759	0,00%	6,64%								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (bulan)	3.724.583.906	0,00	-	12	359.958.333	3	141.171.000	-	-	-	-	3	141.171.000	25,00%	39,22%	0,00	141.171.000	0,00%	16,54%								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														27,48%	21,55%													
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah													
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	#####	100,00	100	290.838.740.595	47.654.420.891	-	-	-	-	-	100	47.654.420.891	100,00%	16,39%	NAN	47.654.420.891	3,43%		Dinas Pendidikan							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian (Dokumen)	1.280.324.592	0,00	-	4	219.905.900	-	10.725.000	-	-	-	-	-	10.725.000	0,00%	4,88%	0,00	10.725.000	0,00%	4,11%								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		#####	-	-		282.204.987.899	47.444.123.010	-	-	-	-	-	47.444.123.010	16,81%			47.444.123.010	9,05%										
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		459.650.000	-	-		100.500.000	3.950.000	-	-	-	-	-	3.950.000	3,93%			3.950.000	0,86%										
Administrasi Umum Perangkat Daerah		13.503.758.494	-	-		2.822.881.800	53.444.802	-	-	-	-	-	53.444.802	1,89%			53.444.802	1,30%										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.028.944.255	-	-		1.036.135.800	103.000.579	-	-	-	-	-	103.000.579	9,94%			103.000.579	4,80%										
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		26.537.270.771	-	-		4.454.329.196	39.177.500	-	-	-	-	-	39.177.500	0,88%			39.177.500	0,16%										
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0,00%	16,39%													
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah													
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	5,20	34.569.060.292	5,00	5	9.457.754.671	1.447.353.333	-	-	-	-	-	100	1.447.353.333	2000,00%	15,30%	NAN	1.447.353.333	4,19%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memadai (Dokumen)	774.390.391	0,00	-	22	374.689.200	-	13.130.000	-	-	-	-	-	13.130.000	0,00%	3,50%	0,00	13.130.000	0,00%	2,01%								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Laporan Keuangan yang memadai (Bulan)	28.462.374.883	0,00	-	16	5.979.992.980	-	1.326.892.739	-	-	-	-	-	1.326.892.739	0,00%	22,19%	0,00	1.326.892.739	0,00%	11,01%								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)	259.317.960	0,00	-	2	119.832.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								





Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			2023	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Persen)	1.327.129.825	0,00	70	1.005.827.500	15	39.170.000	-	-	-	-	-	15	39.170.000	21,43%	3,89%	0,00	39.170.000	0,00%	21,73%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															18,00%	19,30%						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	85,00	67.666.316.922	85,00	85	13.931.699.324	3.225.601.525						85	3.225.601.525	100,00%	23,15%	NAN	3.225.601.525		4,77%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00		100,00	100								100		100,00%		NAN					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	822.540.820	0,00	0	120.657.676	-	15.250.000	-	-	-	-	-	15.250.000	0,00%	12,64%	0,00	15.250.000	0,00%	15,05%			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	53.828.342.004	0,00	5	11.387.519.752	-	2.880.670.038	-	-	-	-	-	2.880.670.038	0,00%	25,30%	0,00	2.880.670.038	0,00%	11,85%			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	-	0,00	5	5.555.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	272.990.000	0,00	25	69.379.300	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah (Berkas)	3.502.904.459	0,00	50	541.306.900	-	81.946.550	-	-	-	-	-	81.946.550	0,00%	15,14%	0,00	81.946.550	0,00%	9,49%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai (%)	6.028.515.289	0,00	40	1.302.678.196	-	214.565.637	-	-	-	-	-	214.565.637	0,00%	16,47%	0,00	214.565.637	0,00%	9,58%			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.211.024.350	0,00	35	504.602.500	-	33.169.300	-	-	-	-	-	33.169.300	0,00%	6,57%	0,00	33.169.300	0,00%	4,93%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															86,25%	23,15%						
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Rendah						
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	72.734.272.694	100,00	100	14.342.989.594	2.681.981.659						100	2.681.981.659	100,00%	18,70%	NAN	2.681.981.659		3,69%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sapiro Perangkat Daerah dan Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	1.854.746.194	0,00	100	371.497.000	25	17.991.000	-	-	-	-	25	17.991.000	25,00%	4,84%	0,00	17.991.000	0,00%	2,80%			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik (Persen)	32.395.127.155	0,00	100	6.318.869.184	25	1.395.523.119	-	-	-	-	25	1.395.523.119	25,00%	22,09%	0,00	1.395.523.119	0,00%	5,19%			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya SDM Yang Disiplin dan Berkapasas (Persen)	1.367.668.500	0,00	100	337.800.000	25	22.000.000	-	-	-	-	25	22.000.000	25,00%	6,51%	0,00	22.000.000	0,00%	8,72%			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	5.091.962.097	0,00	100	614.177.800	25	109.140.743	-	-	-	-	25	109.140.743	25,00%	17,77%	0,00	109.140.743	0,00%	17,05%			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Barang dan Aset Perangkat Daerah (Persen)	2.945.642.096	0,00	100	1.332.903.900	-	634.408.000	-	-	-	-	-	634.408.000	0,00%	47,60%	0,00	634.408.000	0,00%	4,02%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran Yang Baik dan Pemasntas Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Belanja Barang dan Jada Di Dinas Perkimtan KOTA Palangka Raya (Persen)	21.817.022.785	0,00	100	2.997.251.200	25	475.033.797	-	-	-	-	25	475.033.797	25,00%	15,85%	0,00	475.033.797	0,00%	6,22%			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Seluruh Operasional Mobilitas Kantor dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Persen)	7.262.103.867	0,00	100	2.370.490.500	25	27.885.000	-	-	-	-	25	27.885.000	25,00%	1,18%	0,00	27.885.000	0,00%	1,13%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															27,31%	18,70%						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	40.882.156.844	100,00	100	10.609.358.622	1.530.454.366						100	1.530.454.366	100,00%	14,43%		1.530.454.366		3,74%	Dinas Sosial	











Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
			2024	2023	2025	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah (Kegiatan)	24.700.000	0,00	-	3	15.939.817	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	33,33%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan (Kegiatan)	44.880.000	0,00	-	2	13.090.000	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	1.524.752.380	0,00	-	100	142.130.752	25	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	1,59%	
	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang dilaksanakan (Kegiatan)		0,00	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	1,59%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)	1.641.056.000	0,00	-	12	530.388.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan (Kegiatan)	2.254.128.821	0,00	-	3	509.988.508	3	69.256.455	-	-	-	-	-	-	1	69.256.455	25,00%	13,58%	0,00	69.256.455	0,00%	6,79%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara (Unit)	1.853.364.403	0,00	-	15	580.033.300	12	17.565.000	-	-	-	-	-	-	12	17.565.000	80,00%	3,03%	0,00	17.565.000	0,00%	10,13%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	77,80%	19,01%				
																	Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Rendah				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.856.370.805											0,00%				0,00%		Puskesmas Bukit Hindu
Peningkatan Pelayanan BLUD						1.856.370.805												0,00%				0,00%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	0,00%				
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						959.903.361											0,00%				0,00%		Puskesmas Jekan Raya
Peningkatan Pelayanan BLUD						959.903.361												0,00%				0,00%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25,00%	0,00%				
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						534.156.204											0,00%				0,00%		Puskesmas Kalamangan
Peningkatan Pelayanan BLUD						534.156.204												0,00%				0,00%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%				
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.015.103.414											0,00%				0,00%		Puskesmas Kayon
Peningkatan Pelayanan BLUD						2.015.103.414												0,00%				0,00%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25,00%	0,00%				
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						947.514.824											0,00%				0,00%		Puskesmas Kereng Bangkirai
Peningkatan Pelayanan BLUD						947.514.824												0,00%				0,00%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%				
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						701.783.580											0,00%				0,00%		Puskesmas Marina Permai
Peningkatan Pelayanan BLUD						701.783.580												0,00%				0,00%	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%				
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)	SKPD Penanggungjawab					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.342.251.843				0,00%	0,00%	Puskesmas Menteng					
Peningkatan Pelayanan BLUD				2.342.251.843				0,00%	0,00%						
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	0,00%						
							Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.626.710.508		3.114.955.254	367.304.801		367.304.801	11,79%	367.304.801	4,82%	Puskesmas Pahandut				
Peningkatan Pelayanan BLUD		7.626.710.508		3.114.955.254	367.304.801		367.304.801	11,79%	367.304.801	4,82%					
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	11,79%						
							Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.634.909.977				0,00%	0,00%	Puskesmas Panarung					
Peningkatan Pelayanan BLUD				1.634.909.977				0,00%	0,00%						
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	0,00%						
							Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.024.981.272				0,00%	0,00%	Puskesmas Tangkiling					
Peningkatan Pelayanan BLUD				1.024.981.272				0,00%	0,00%						
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%						
							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		458.496.252.824		11.000.000.000	1.096.340.871		1.096.340.871	9,97%	1.096.340.871	0,24%	Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya				
Peningkatan Pelayanan BLUD		458.496.252.824		11.000.000.000	1.096.340.871		1.096.340.871	9,97%	1.096.340.871	0,24%					
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25,00%	9,97%						
							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>															
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI (Kegiatan)	98,10	97,13	97,15			97	100,00%		Dinas Pendidikan					
	APM SMP/MTs (Kegiatan)	95,20	94,56	94,6			95	100,01%							
	APM PAUD (Kegiatan)	40,50	37,37	37,4	91.737.053.600	109.057.000	45	109.057.000	119,65%	0,12%					
	Menurunnya Angka Putus Sekolah (Kegiatan)	0,01	0,02	0,01			0	100,00%							
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Murni Angka Putus Sekolah (% % 0,01 %)	266.334.697.621	0,00	100	53.473.544.000	8.485.000		8.485.000	0,00%	0,02%	0,00	8.485.000	0,00%	0,01%	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Murni Angka Putus Sekolah (% % 0,01 %)	156.791.082.726	0,00	100	25.724.717.500	24.472.000		24.472.000	0,00%	0,10%	0,00	24.472.000	0,00%	0,02%	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (1)	34.451.506.304	0,00	1	6.615.130.300	44.850.000		44.850.000	0,00%	0,68%	0,00	44.850.000	0,00%	0,00%	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (1)	19.253.116.340	0,00	1	5.923.661.800	31.250.000		31.250.000	0,00%	0,53%	0,00	31.250.000	0,00%	0,16%	
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,12%						
							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentasi Guru yang telah mengikuti Ujian Kompetensi Guru (Kegiatan)	95,00	4.988.406.800	75,00	75	1.564.241.500	43.562.500	100,00%	2,78%	43.562.500	0,87%	Dinas Pendidikan			
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D-IV Presentase Guru Yang Telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru Rasio Guru terhadap Siswa (% % 1:15 indeks)	4.988.406.800	0,00	100	1.564.241.500	43.562.500		43.562.500	0,00%	2,78%	0,00	43.562.500	0,00%	0,87%	
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	2,78%						

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab																
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah															
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Angka Kematian Ibu (AKI) (100000 KH)	29,20	210.117.174.663	22,49	23,5	53.923.802.144	5.681.618.800							5.681.618.800	0,00%	10,54%	NAN	5.681.618.800	2,70%	Dinas Kesehatan																
	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	100,00		94,00	0										0,00%		NAN																			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			28.288.151.053			24.186.932.400	40.950.000							40.950.000	0,17%			40.950.000	7,22%																	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			180.273.974.772			29.510.646.944	5.608.329.800							5.608.329.800	19,00%			5.608.329.800	47,72%																	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			1.186.469.875			195.693.800	26.680.000							26.680.000	13,63%			26.680.000	2,25%																	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			368.578.963			30.529.000	5.659.000							5.659.000	18,54%			5.659.000	1,54%																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0,34%	10,54%																				
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah															
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	47,80	12.932.015.631	0,00	0	820.972.000	20.770.601							20.770.601	0,00%	2,53%	NAN	20.770.601	0,16%	Dinas Kesehatan																
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			93.591.250			28.500.000	5.700.000							5.700.000	20,00%			5.700.000	6,09%																	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			10.313.471.493			211.682.000	15.070.601							15.070.601	7,12%			15.070.601	14,59%																	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.524.952.888			580.790.000	-							-	0,00%			-	0,00%																	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0,00%	2,53%																				
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah															
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	28,65	2.167.024.088	0,00	0	585.307.800	2.500.000							2.500.000	0,00%	0,43%	NAN	2.500.000	0,12%	Dinas Kesehatan																
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			288.621.813			108.939.000	-							-	0,00%			-	0,00%																	
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbaikan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			20.145.625			2.400.000	-							-	0,00%			-	0,00%																	
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			886.972.350			226.706.600	-							-	0,00%			-	0,00%																	
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			267.120.000			36.328.800	1.900.000							1.900.000	5,23%			1.900.000	0,71%																	
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			36.137.500			4.500.000	600.000							600.000	13,33%			600.000	1,66%																	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		668.026.800			206.433.400												0,00%				0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																1,49%	0,43%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Obedayakan (%)	20,00	1.796.536.225	0,00	0	741.078.400	20.043.500									20.043.500	0,00%	2,70%	NAN	20.043.500	1,12%	Dinas Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		397.833.999			99.304.400												0,00%				0,00%	
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		514.896.500			125.000.000												0,00%				0,00%	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		883.805.726			516.774.000	20.043.500										20.043.500	3,88%		20.043.500	2,27%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																7,28%	2,70%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		4.037.163.200			1.182.744.437	97.508.700										97.508.700	8,24%		97.508.700	2,42%	Puskesmas Bukit Hindu	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4.037.163.200			1.182.744.437	97.508.700										97.508.700	8,24%		97.508.700	81,18%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																24,67%	8,24%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		34.160.000			7.174.000												0,00%				0,00%	Puskesmas Bukit Hindu
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		34.160.000			7.174.000												0,00%				0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																25,00%	0,00%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		2.272.798.000			688.298.000	13.435.156										13.435.156	1,95%		13.435.156	0,59%	Puskesmas Jekan Raya	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.272.798.000			688.298.000	13.435.156										13.435.156	1,95%		13.435.156	1,71%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																25,04%	1,95%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>		3.240.000			5.910.000												0,00%				0,00%	Puskesmas Jekan Raya
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		3.240.000			5.910.000												0,00%				0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																25,00%	0,00%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		2.914.704.887			716.337.952	5.355.730										5.355.730	0,75%		5.355.730	0,18%	Puskesmas Klampangan	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.914.704.887			716.337.952	5.355.730										5.355.730	0,75%		5.355.730	0,49%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																19,33%	0,75%					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)	SKPD Penanggungjawab																
<b>Predikat Kinerja</b>																		Sangat Rendah	Sangat Rendah															
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			4.192.251.813			1.111.163.538		77.002.747						77.002.747	6,93%	77.002.747	1,84%	Puskesmas Kayon																
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.192.251.813			1.111.163.538		77.002.747						77.002.747	6,93%	77.002.747	21,25%																	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																		24,34%	6,93%															
<b>Predikat Kinerja</b>																		Sangat Rendah	Sangat Rendah															
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			6.400.000			7.150.000		-						-	0,00%	-	0,00%	Puskesmas Kayon																
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.400.000			7.150.000		-						-	0,00%	-	0,00%																	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																		25,00%	0,00%															
<b>Predikat Kinerja</b>																		Sangat Rendah	Sangat Rendah															
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.934.677.448			686.565.970		25.839.890						25.839.890	3,76%	25.839.890	0,88%	Puskesmas Kereng Bangkirai																
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.934.677.448			686.565.970		25.839.890						25.839.890	3,76%	25.839.890	1,94%																	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																		6,42%	3,76%															
<b>Predikat Kinerja</b>																		Sangat Rendah	Sangat Rendah															
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-			10.600.000		-						-	0,00%	-	0,00%	Puskesmas Kereng Bangkirai																
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-			10.600.000		-						-	0,00%	-	0,00%																	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																		0,00%	0,00%															
<b>Predikat Kinerja</b>																		Sangat Rendah	Sangat Rendah															
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			3.683.408.569			997.475.866		20.994.633						20.994.633	2,10%	20.994.633	0,57%	Puskesmas Marina Permai																
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.683.408.569			997.475.866		20.994.633						20.994.633	2,10%	20.994.633	1,54%																	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																		21,59%	2,10%															
<b>Predikat Kinerja</b>																		Sangat Rendah	Sangat Rendah															
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			3.797.817.970			1.178.449.340		17.661.767						17.661.767	1,50%	17.661.767	0,47%	Puskesmas Menteng																
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.797.817.970			1.178.449.340		17.661.767						17.661.767	1,50%	17.661.767	1,52%																	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																		0,49%	1,50%															
<b>Predikat Kinerja</b>																		Sangat Rendah	Sangat Rendah															
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			145.500.000			6.380.000		-						-	0,00%	-	0,00%	Puskesmas Menteng																
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			145.500.000			6.380.000		-						-	0,00%	-	0,00%																	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																		100,00%	0,00%															
<b>Predikat Kinerja</b>																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah															







Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)	SKPD Penanggungjawab			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	12,59%	0,00%					
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase Kelataan terhadap Penataan Ruang (%)	75,00	1.934.514.602	68,00	70	1.410.125.500		41.771.086							41.771.086	0,00%	2,96%	41.771.086	2,16%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada yang Ditetapkan/Diosialisasikan (Perda/Perkada)			0,00	3	61.779.800		1.998.000							1.998.000	0,00%	3,23%	0,00	1.998.000	0,00%			
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						1.140.417.000		5.113.000							5.113.000	0,45%		5.113.000	0,00%				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1.934.514.602				207.928.700		34.660.086							34.660.086	16,67%		34.660.086	1,56%				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	80,72%	2,96%					
Predikat Kinerja																	Tinggi	Sangat Rendah					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>																							
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase Rumah Layak Huni (%)	44,63	7.395.580.012	6,06	7,047	4.190.278.100		113.103.034							113.103.034	0,00%	2,70%	NAN	113.103.034	1,53%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhi Data Lokasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Rumah Korban Bencana (Persen)		32.334.000	0,00	100	42.308.600	25	950.000							25	25,00%	2,25%	0,00	950.000	0,00%	1,08%		
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Khusus Korban Bencana Beserta PSU Yang Layak (Persen)		675.767.400	0,00	100	513.919.200	25	-							25	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pembiayaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembiayaan dan Pembiayaan Pengelolaan Rumah Susun Yang Baik dan Layak (Persen)		3.596.324.012	0,00	100	1.222.255.300	25	52.174.934							25	52.174.934	25,00%	4,27%	0,00	52.174.934	0,00%	2,40%	
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Tercapainya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Persen)		3.091.154.600	0,00	100	2.411.795.000	25	59.978.100							25	59.978.100	25,00%	2,49%	0,00	59.978.100	0,00%	1,94%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	32,24%	2,70%					
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase Rumah Layak Huni (%)	80,51	24.790.105.000	80,23	80,38	8.448.140.400		-							-	0,00%	0,00%	NAN	-	0,00%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas di Kawasan Permukiman Kumuh (Persen)		1.668.050.000	0,00	100	1.534.800.000	25	-							25	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni Di Kawasan Permukiman Kumuh (122,057 Persen)		23.122.055.000	0,00	22,057	6.913.340.400	20	-							20	90,67%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	0,00%					
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Persentase Rumah Layak Huni (%)	11,28	21.365.637.228	8,04	8,043	4.705.360.400		266.615.020							266.615.020	0,00%	5,67%	NAN	266.615.020	1,25%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya RUMAH Layak Huni Di Kawasan Permukiman Kumuh (96,73 Persen)		21.365.637.228	0,00	96,73	4.705.360.400	20	266.615.020							20	266.615.020	20,68%	5,67%	0,00	266.615.020	0,00%	1,25%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	10,00%	5,67%					
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU (%)	34,70	325.908.027.125	24,56	25,06	53.999.041.730		2.073.359.863							2.073.359.863	0,00%	3,84%	NAN	2.073.359.863	0,64%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU (%)		325.908.027.125	0,00	56,48	53.999.041.730	10	2.073.359.863							10	2.073.359.863	17,71%	3,84%	0,00	2.073.359.863	0,00%	1,71%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	20,22%	3,84%					
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>																							



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Sosial/Kelompok Sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan: Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (1)	68.221.013	0,00	-	1	5.000.000	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	0,00%	6,00%	0,00	300.000	0,00%	0,44%		
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelengkapan yang Akreditasi Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang tersertifikasi (Lembaga 11 orang)	1.293.551.581	0,00	-	10	371.140.000	-	3.700.000	-	-	-	-	-	3.700.000	0,00%	1,00%	0,00	3.700.000	0,00%	0,48%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0,33%	1,06%						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100,00	2.666.108.564	0,00	-	100	615.459.800	35.467.800	-	-	-	-	-	100	35.467.800	100,00%	5,76%	35.467.800	100,00%	1,33%	Dinas Sosial	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlarang, Anak Terlarang, Lanjut Usia Terlarang, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS SPM yang direncanakan mendapatkan pelayanan dan pembinaan (1)	2.481.275.489	0,00	-	1	604.209.800	-	34.467.800	-	-	-	-	-	34.467.800	0,00%	5,70%	0,00	34.467.800	0,00%	32,10%		
Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		184.833.075	0,00	-	-	11.250.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	0,00%	8,89%	0,00	1.000.000	0,00%	2,33%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															8,43%	5,76%						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial (%)	45,00	11.032.830.439	0,00	-	100	2.811.450.000	5.700.000	-	-	-	-	-	100	5.700.000	100,00%	0,20%	5.700.000	100,00%	0,05%	Dinas Sosial	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial (1)	11.032.830.439	0,00	-	1	2.811.450.000	-	5.700.000	-	-	-	-	-	5.700.000	0,00%	0,20%	0,00	5.700.000	0,00%	0,42%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0,00%	0,20%						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100,00	5.773.661.237	0,00	-	100	190.855.000	5.020.000	-	-	-	-	-	100	5.020.000	100,00%	2,63%	5.020.000	100,00%	0,09%	Dinas Sosial	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya undefined (%) undefined	5.599.041.550	0,00	-	100	165.255.000	-	5.020.000	-	-	-	-	-	5.020.000	0,00%	3,04%	0,00	5.020.000	0,00%	0,30%		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Petugas dan Masyarakat yang Mampu Menanggulangi Bencana ()	214.619.687	0,00	-	100	25.600.000	25	-	-	-	-	-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															10,63%	2,63%						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>																						
<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Proyek Keterselenggaraan yang Dinarafatkan untuk Pengambilan Kebijakan Ketenagakerjaan (%)	100,00	200.000.000	40,00	-	40	407.000.000	17.587.969	-	-	-	-	-	17.587.969	0,00%	4,32%	17.587.969	0,00%	8,79%	Dinas Tenaga Kerja		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Rencana tenaga kerja yang terarah dan berkesinambungan (persen)	200.000.000	0,00	-	100	407.000.000	25	17.587.969	-	-	-	-	25	17.587.969	25,00%	4,32%	0,00	17.587.969	0,00%	8,79%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															100,00%	4,32%						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Penurunan Angka Pengangguran Terbuka (%)	2,00	3.469.290.561	0,00	-	100	426.371.359	20.085.760	-	-	-	-	-	20.085.760	0,00%	4,71%	20.085.760	0,00%	0,58%	Dinas Tenaga Kerja		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (%)		3.172.537.495	0,00	-	70	370.371.359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK Swasta Yang Dibina (1)		71.146.816	0,00	-	100	6.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)		225.606.250	0,00	-	50	49.550.000	-	20.085.760	-	-	-	-	-	-	-	20.085.760	0,00%	40,54%	0,00	20.085.760	0,00%	8,90%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																11,62%	4,71%							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%)	65,00	808.172.226	0,00	-	100	212.950.622		19.145.000		-		-		-	19.145.000	0,00%	8,99%		19.145.000		2,37%	Dinas Tenaga Kerja	
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota (%)		544.572.726	0,00	-	100	69.097.222	65	19.145.000		-		-		-	65	19.145.000	65,00%	27,71%	0,00	19.145.000	0,00%	3,85%	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Ketersediaan Informasi Pasar Kerja (%)		263.599.500	0,00	-	100	121.993.000	25	-		-		-		-	25	-	25,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI & CPMI yg mendapatkan pelayanan pelindungan Pra penempatan & Purna Penempatan bagi CPMI dan PMI yang berasal dari Kota Palangka Raya (persen)		-	0,00	-	100	21.860.400	-	-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																14,98%	8,99%							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak (%)	75,00	819.472.025	0,00	-	100	76.000.100		15.402.900		-		-		-	15.402.900	0,00%	20,27%		15.402.900		1,88%	Dinas Tenaga Kerja	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan Yang Disahkan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan (0.75)		543.207.425	0,00	-	75	34.840.500	15	8.328.300		-		-		15	8.328.300	20,00%	23,90%	0,00	8.328.300	0,00%	1,53%		
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang dicegah dan persentase perselisihan yang diselesaikan (perkara)		276.264.600	0,00	-	11	41.159.600	1	7.074.600		-		-		1	7.074.600	9,09%	17,19%	0,00	7.074.600	0,00%	8,78%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																12,50%	20,27%							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																								
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>			-	-	-	80.790.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			-	0,00%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat		
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (Kali)		0,00	-	6	80.790.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>			665.098.000	-	-	198.336.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			-	0,00%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan		
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			209.372.000	-	-	28.471.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%			-	0,00%			
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani (orang)		317.686.000	0,00	-	30	81.465.000	-	-		-		-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)		138.040.000	0,00	-	12	88.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			465.386.000	-	-		114.346.500	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00%				0,00%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (Skor)		465.386.000	0,00	-	900	114.346.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			650.420.000	-	-		427.686.200	10.280.000	-	-	-	-	-	-	10.280.000		2,40%	10.280.000		1,58%		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Pencengahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang)		203.000.000	0,00	-	5	130.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Orang)		259.880.000	0,00	-	12	205.825.000	10.280.000	-	-	-	-	-	-	10.280.000	0,00%	4,99%	0,00	10.280.000	0,00%	3,96%	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan (program)/ kegiatan pencegahan KTA (prang)		187.540.000	0,00	-	10	91.861.200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	2,40%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																						
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Angka Kecukupan Energi dan Protein (kcal/gram)	80,00	3.934.763.444	80,00	-	80	753.121.830	123.065.250	-	-	-	-	-	80	123.065.250	100,00%	16,34%	NAN	123.065.250		3,13%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan			942.803.600	-	-		349.448.430	65.452.250	-	-	-	-	-	65.452.250		18,73%	65.452.250		21,36%			
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Telaksananya Kegiatan pencapaian target konsumsi pangan/kapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Tersedianya dan tersukurnya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan (Dokumen 6,5 Ton Dokumen)		1.067.343.500	0,00	-	1	152.928.000	37.856.200	-	-	-	-	-	37.856.200	0,00%	24,75%	0,00	37.856.200	0,00%	6,05%		
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			1.924.616.344	-	-		250.745.400	19.756.800	-	-	-	-	-	19.756.800		7,88%	19.756.800		1,09%			
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																5,27%	16,34%					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab																		
<b>Predikat Kinerja</b>																						Sangat Rendah	Sangat Rendah																	
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Menurunnya Persentase Daerah (Kelurahan) Rawan Pangan (%)	100,00	114.689.600	100,00	100	24.999.900	3.149.975	-	-	-	-	-	100	3.149.975	100,00%	12,60%	NAN	3.149.975	2,75%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																				
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pencapaian target konsumsi pangan/kapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Tersedianya dan tersukunya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (Dokumen 6.5 Ton Dokumen)		84.689.600	0,00	1	12.599.900	3.149.975	-	-	-	-	-	3.149.975	0,00%	25,00%	0,00	3.149.975	0,00%	3,72%																					
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pencapaian target konsumsi pangan/kapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi Tersedianya Cadangan Pangan Tersedianya dan tersukunya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (Dokumen 6.5 Ton Dokumen)		30.000.000	0,00	1	12.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%																					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																						0,00%	12,60%																	
<b>Predikat Kinerja</b>																						Sangat Rendah	Sangat Rendah																	
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Menurunnya Jumlah Rekomendasi yang Diberikan (%)	80,00	194.651.281	80,00	80	35.056.800	3.933.900	-	-	-	-	-	80	3.933.900	100,00%	11,22%	NAN	3.933.900	2,02%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																				
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pencapaian target konsumsi pangan/kapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Tersedianya dan tersukunya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (Dokumen 6.5 Ton Dokumen)		194.651.281	0,00	1	35.056.800	3.933.900	-	-	-	-	-	3.933.900	0,00%	11,22%	0,00	3.933.900	0,00%	9,24%																					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																						0,00%	11,22%																	
<b>Predikat Kinerja</b>																						Sangat Rendah	Sangat Rendah																	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>																																								
<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Persentase Sengketa Tanah Garapan (%)	100,00	-	100,00	100	216.913.800	12.747.800	-	-	-	-	-	100	12.747.800	100,00%	5,88%	NAN	12.747.800	0,00%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																				
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Persen)		-	0,00	58,2	216.913.800	20	12.747.800	-	-	-	-	20	12.747.800	34,36%	5,88%	0,00	12.747.800	0,00%	0,00%																				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																						25,00%	5,88%																	
<b>Predikat Kinerja</b>																						Sangat Rendah	Sangat Rendah																	
<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (%)	100,00	14.308.572.287	100,00	100	5.361.865.148	204.576.948	-	-	-	-	-	100	204.576.948	100,00%	3,82%	NAN	204.576.948	1,43%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																				
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Yang Tertangani (Persen)		14.308.572.287	0,00	75	5.361.865.148	10	204.576.948	-	-	-	-	10	204.576.948	13,33%	3,82%	0,00	204.576.948	0,00%	3,26%																				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																						49,39%	3,82%																	
<b>Predikat Kinerja</b>																						Sangat Rendah	Sangat Rendah																	





Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)	SKPD Penanggungjawab			
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil					50.000.000			0,00%	0,00%				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							36,53%	50,05%					
Predikat Kinerja							Sangat Rendah	Rendah					
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder (%)	100,00		100		100	100,00%			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik (%)	100,00	3.059.160.429	100,00	100	190.589.300	71.802.380	100,00%	37,67%	71.802.380	2,35%		
	Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai (%)	100,00		100				100,00%					
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (Dokumen)		2.523.267.740	0,00	2	101.250.200	54.971.280	0,00%	54,29%	0,00	54.971.280	0,00%	11,38%
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dokumen)		535.892.689	0,00	12	89.339.100	16.831.100	25,00%	18,84%	0,00	16.831.100	0,00%	6,39%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							3,91%	37,67%					
Predikat Kinerja							Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Memadai (%)	100,00	645.668.015	100,00	100	105.286.400		100,00%	0,00%			0,00%	
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun (Dokumen)		645.668.015	0,00	2	105.286.400		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00%	0,00%					
Predikat Kinerja							Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>													
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Anggota Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas (%)	3,33	287.000.000	0,00	0	335.000.000	2.240.000	0,00%	0,67%	NAN	2.240.000		0,78%
Binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			287.000.000			335.000.000	2.240.000		0,67%		2.240.000		2,99%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00%	0,67%					
Predikat Kinerja							Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase PKK Aktif (%)	36,00	15.996.600.000	0,00	0	7.962.467.478	38.220.000	0,00%	0,48%	NAN	38.220.000		0,24%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat dan Kemasyarakatan Aktif (Lembaga)		15.996.600.000	0,00	65	7.962.467.478	38.220.000	0,00%	0,48%	0,00	38.220.000	0,00%	0,75%
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)							0,00%	0,48%					
Predikat Kinerja							Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>													
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB (%)	53,00	865.204.000	4,17	10	654.801.900	52.575.000	0,00%	8,03%	NAN	52.575.000		6,08%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab											
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (Kali)	248.754.000	0,00	-	8	373.201.900	-	52.375.000	-	-	-	-	-	52.375.000	0,00%	14,03%	0,00	52.375.000	0,00%	41,55%												
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pemetaan Hasil data Kependudukan di Kota Palangka Raya (Dokumen)	616.450.000	0,00	-	1	281.600.000	-	200.000	-	-	-	-	-	200.000	0,00%	0,07%	0,00	200.000	0,00%	0,00%												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0,00%	6,03%																
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah																
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Contraceptive (mPCR) (%)	7,18	8,00	-	7,82									8	102,30%		NAN				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan											
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	17,05	14,30	-	16,33	1.980.300.000	18.000.000							14	87,57%		NAN	18.000.000		0,25%												
	Persentase Cakupan KB Aktif (%)	1,00	1,00	-	1									1	100,00%		NAN															
	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR) (%)	79,26	71,49	-	73,82									71	96,83%		NAN															
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pertemuan Advokasi Program KBPK dan Stakeholders dan Mitra Kerja (Kali)	1.346.000.000	0,00	-	6	545.000.000	-	14.400.000	-	-	-	-	-	14.400.000	0,00%	2,64%	0,00	14.400.000	0,00%	2,90%												
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Pus Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (%)	1.893.097.412	0,00	-	6,33	254.647.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Kali)	1.358.448.064	0,00	-	3	978.381.000	-	3.600.000	-	-	-	-	-	3.600.000	0,00%	0,37%	0,00	3.600.000	0,00%	1,98%												
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB (Kali)	2.510.861.000	0,00	-	12	202.272.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0,00%	0,91%																
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah																
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Persentase Kelompok Tribina (%)	2,21	5.053.790.000	2,35	2,35	2.009.018.078	12.204.000							2	12.204.000	100,00%	0,61%	NAN	12.204.000		0,24%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan										
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Total Fertility Rate (TFR) TOTAL FERTILITY RATE (TFR) (%) (1.96 %)	2.206.190.000	0,00	-	2	517.418.078	-	12.204.000	-	-	-	-	-	12.204.000	0,00%	2,36%	0,00	12.204.000	0,00%	4,25%												
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Slunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Beduta/Balita) (%)	2.847.600.000	0,00	-	12	1.491.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%												
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0,00%	0,61%																
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah																
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>																																
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Level Keselamatan Transportasi (Nilai)	0,09	25.426.545.068	0,11	0,09	24.694.512.263	5.240.347.634							0	5.240.347.634	221,11%	21,22%	5.240.347.634		20,61%	Dinas Perhubungan											
Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang berfungsi (Unit)	12.571.144.818	0,00	-	2	23.365.885.700	-	5.077.443.034	-	-	-	-	-	5.077.443.034	0,00%	21,73%	0,00	5.077.443.034	0,00%	428,11%												



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	
Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang Menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah (Daerah)		0,00	0	2.804.829.637	100	203.851.250							25	203.851.250	0,00%	7,27%	0,00	203.851.250	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																29,42%	7,75%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>																						
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase Koperasi Berkualitas (%)	50,00	200.000.000	39,00	39	16.899.800		3.800.000						4	3.800.000	10,26%	22,49%		3.800.000	1,90%		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Berkualitas (Koperasi)		200.000.000	0,00	90	16.899.800		3.800.000							3.800.000	0,00%	22,49%	0,00	3.800.000	0,00%	1,90%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																27,27%	22,49%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Persentase Koperasi Sehat (%)	40,00	427.137.275	15,80	0	44.999.900								22		0,00%	0,00%			0,00%		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat (Koperasi)		427.137.275	0,00	120	44.999.900										0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase Koperasi yang Difasilitasi Pelatihan Perkoperasian (%)	160,00	1.130.053.875	100,00	0	47.000.000								22		0,00%	0,00%			0,00%		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Difasilitasi Pelatihan Perkoperasian (160 Koperasi)		1.130.053.875	0,00	160	47.000.000										0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase Koperasi yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (%)	100,00	77.285.200	100,00	0	31.583.000								47		0,00%	0,00%			0,00%		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan (220 Koperasi)		77.285.200	0,00	220	31.583.000										0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (%)	34,00	2.140.989.200	22,00	0	705.112.600		4.600.000						98	4.600.000	0,00%	0,65%		4.600.000	0,21%		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Kecil (Unit Usaha)		2.140.989.200	0,00	27500	705.112.600		4.600.000							4.600.000	0,00%	0,65%	0,00	4.600.000	0,00%	8,20%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,77%	0,65%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase UMKM yang Difasilitasi dengan Pengembangan Usaha (%)	90,00	946.091.774	60,00	0	2.808.375.000								60		0,00%	0,00%			0,00%		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha UMKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha (Unit Usaha)		946.091.774	0,00	70	2.808.375.000										0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)	SKPD Penanggungjawab
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>										
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	50,00	1.872.091.600	0,00	0	477.433.600	-	0,00%	0,00%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Iklim Yang Kondusif (0.2)		1.347.892.000	0,00	2	320.688.000	-	0,00%	0,00%	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			524.199.600	-	-	156.745.600	-	0,00%	0,00%	
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%	
							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	35,00	258.761.425	0,00	0	83.551.600	-	0,00%	0,00%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investasi PMDN (%)		258.761.425	0,00	2	83.551.600	-	0,00%	0,00%	
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%	
							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	85,96	180.806.600	81,01	81,98	183.629.000	81	99,35%	0,00%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)		180.806.600	0,00	83	183.629.000	-	0,00%	0,00%	
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%	
							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	45,00	374.018.000	16,50	25	68.239.700	3	12,16%	0,00%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Menyampaikan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (0.3)		374.018.000	0,00	3	68.239.700	-	0,00%	0,00%	
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%	
							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>										
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Rasio Wirausaha Pemuda (Orang)	23,00	-	16,00	16	446.212.000	15.534.600	0,00%	3,48%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Kewirausahaan Pemuda di Kota Palangka Raya Tingkat Partisipasi Pemuda untuk Mengikuti Kegiatan Pemuda Pelopor (% %)		-	0,00	100	346.212.000	15.534.600	25,00%	4,49%	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda untuk Mengikuti Kegiatan Pemuda Pelopor (Orang)		-	0,00	15	100.000.000	-	0,00%	0,00%	
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	3,48%	
							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan (Orang)	59,00	-	0,00	59	2.700.483.800	38.676.840	0,00%	1,43%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Kab/Kota yang Dilikuti (Kegiatan)		-	0,00	1	750.483.800	38.676.840	25,00%	5,15%	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi (1)		-	0,00	1	50.000.000	1	100,00%	0,00%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang Berada Dalam Pembinaan (%)			0,00		1	1.900.000.000	1	-					0		25,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0,00%	1,43%					
		Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Kegiatan)	31,00	1.547.245.028	0,00		31	316.228.000		31.850.300						31.850.300	0,00%	10,07%		31.850.300		2,06%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan Binaan (1)		1.547.245.028	0,00		1	316.228.000	1	31.850.300					0	31.850.300	25,00%	10,07%	0,00	31.850.300	0,00%	4,92%		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															17,09%	10,07%					
		Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>																							
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (%)	1,00		0,00		0	497.512.525		70.348.000						70.348.000	0,00%	14,14%		70.348.000		0,00%	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Daerah)			0,00		1	497.512.525	100	70.348.000					25	70.348.000	2500,00%	14,14%	0,00	70.348.000	0,00%	0,00%		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															21,63%	14,14%					
		Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>																							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)	70,00	1.144.658.385	0,00		42	266.057.000		500.000					42	500.000	100,00%	0,19%		500.000		0,04%	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Per Area Keamanan Informasi (Nilai)		1.144.658.385	0,00		300	266.057.000		500.000						500.000	0,00%	0,19%	0,00	500.000	0,00%	0,08%		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															25,76%	0,19%					
		Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>																							
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah SDM yang melestarikan Kesenian Tradisional dan Objek Kebudayaan (Orang)	20,00	6.337.104.000	0,00		20	1.452.675.800		17.683.230						17.683.230	0,00%	1,22%		17.683.230		0,28%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang melestarikan Kesenian Tradisional dan Objek Kebudayaan (orang)		5.237.272.000	0,00		25	1.242.711.400	10	-					10	-	40,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															3,61%	1,22%					
		Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang Melestarikan Kesenian Tradisional (Kegiatan)		1.099.832.000	0,00		1	209.964.400	1	17.683.230					0	17.683.230	25,00%	8,42%	0,00	17.683.230	0,00%	1,61%		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															3,61%	1,22%					
		Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			10.250.000.000				2.050.000.000		-						-		0,00%			-	0,00%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga)		10.250.000.000	0,00		1	2.050.000.000	1	-					1	-	100,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0,00%	0,00%					
		Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			374.660.000				1.230.000.000		5.000.000						5.000.000		0,41%		5.000.000		1,33%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota (Cagar Budaya)		374.660.000	0,00		8	1.230.000.000	8	5.000.000					2	5.000.000	25,00%	0,41%	0,00	5.000.000	0,00%	1,33%		
		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															25,00%	0,41%					
		Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)	SKPD Penanggungjawab					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>															
<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan (IKM)	2,46	0,00	2	791.911.800	20.798.600	2	20.798.600	100,00%	2,63%	NAN	20.798.600	0,00%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)		0,00	1	467.848.500	12.938.600	0	12.938.600	25,00%	2,77%	0,00	12.938.600	0,00%		
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah (1)		0,00	100	324.063.300	7.860.000	20	7.860.000	20,00%	2,43%	0,00	7.860.000	0,00%		
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	2,63%						
							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>					114.939.900	-			0,00%				0,00%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno milik daerah Kabupaten/Kota (Judul)		0,00	1	111.939.900	-			0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%		
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah/Kab/Kota (Eksemplar)		0,00	1	3.000.000	-			0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%		
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%						
							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>															
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (%)	100,00	587.361.137	100,00	100	105.031.700	6.860.000	100	6.860.000	100,00%	6,53%	NAN	6.860.000	1,17%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai ASKE dan LAKE serta ASKI dan LAKI (Nilai)	510.198.700	0,00	60	85.506.100	6.860.000	-	6.860.000	0,00%	8,02%	0,00	6.860.000	0,00%	11,70%	
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai ASKE dan LAKE serta ASKI dan LAKI (Nilai)		0,00	60	2.812.600	-			0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%		
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Informasi Kearsipan dapat diakses melalui JIKN (Jaringan)	77.162.437	0,00	1	16.713.000	-			0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%		
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	6,53%						
							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Persentase SOPD yang sudah melaksanakan Program perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	80,00	12.000.000	0,00	0	27.094.000	-		0,00%	0,00%	NAN	-	0,00%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kearsipan (Nilai)		0,00	50	19.017.400	-			0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%		
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Abstr Media Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kearsipan (Nilai)	12.000.000	0,00	50	8.076.600	-			0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%		
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%						
							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>															
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton / Tahun)	3400,00	2.410.311.049	3150,00	3200	1.321.110.200	8.610.000	-	8.610.000	0,00%	0,65%	8.610.000	0,36%	Dinas Perikanan	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	2.260.406.049	0,00	20	1.286.610.200	8.610.000	-	8.610.000	0,00%	0,67%	0,00	8.610.000	0,00%	9,95%	
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi dan mendapatkan pembinaan serta pemantauan (Kelompok)	149.905.000	0,00	5	34.500.000	-			0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%		
							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	5,43%	0,65%						



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Orang)		10.726.827.971	0,00	-	20	2.750.835.000	5	38.062.640	-	-	-	-	5	38.062.640	25,00%	1,38%	0,00	38.062.640	0,00%	12,72%	
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	25,00%	1,38%				
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>																						
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (%)	16,00	7.291.874.599	16,00	-	16	1.831.902.065		118.769.100	-	-	-	-	16	118.769.100	100,00%	6,48%	NAN	118.769.100		1,63%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Laporan)		4.749.234.874	0,00	-	20	906.460.140	-	42.072.000	-	-	-	-	-	42.072.000	0,00%	4,64%	0,00	42.072.000	0,00%	1,75%	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)		622.080.368	0,00	-	1	82.046.800	-	14.861.500	-	-	-	-	-	14.861.500	0,00%	18,11%	0,00	14.861.500	0,00%	2,39%	
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan /Pakan Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		584.526.433	0,00	-	12	78.200.000	-	900.000	-	-	-	-	-	900.000	0,00%	1,15%	0,00	900.000	0,00%	0,15%	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hewan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)		756.472.924	0,00	-	12	274.415.426	-	24.645.600	-	-	-	-	-	24.645.600	0,00%	8,98%	0,00	24.645.600	0,00%	3,85%	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)		579.560.000	0,00	-	100	490.779.700	-	36.290.000	-	-	-	-	-	36.290.000	0,00%	7,39%	0,00	36.290.000	0,00%	6,26%	
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	3,57%	6,48%				
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan dan Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)	16,00	6.243.223.063	16,00	-	16	501.943.434		35.792.800	-	-	-	-	16	35.792.800	100,00%	7,13%	NAN	35.792.800		0,57%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)		1.053.074.000	0,00	-	12	90.802.634	-	9.780.000	-	-	-	-	-	9.780.000	0,00%	10,77%	0,00	9.780.000	0,00%	5,78%	
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)		5.190.149.063	0,00	-	2	411.140.800	-	26.012.800	-	-	-	-	-	26.012.800	0,00%	6,33%	0,00	26.012.800	0,00%	1,75%	
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	18,77%	7,13%				
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)	90,00	2.544.833.388	90,00	-	90	583.862.862		85.145.675	-	-	-	-	-	85.145.675	0,00%	14,59%	NAN	85.145.675		3,35%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader Zoonosis (Orang)		1.476.373.313	0,00	-	12	431.253.130	-	50.931.675	-	-	-	-	-	50.931.675	0,00%	11,81%	0,00	50.931.675	0,00%	11,43%	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)		177.849.200	0,00	-	4	17.991.500	-	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	0,00%	55,58%	0,00	10.000.000	0,00%	5,62%	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)		890.610.875	0,00	-	4	134.438.232	-	24.214.000	-	-	-	-	-	24.214.000	0,00%	18,01%	0,00	24.214.000	0,00%	2,72%	
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	5,45%	14,59%				
																Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Produksi (%)	16,00	1.144.525.131	16,00	-	16	165.218.200		17.559.700	-	-	-	-	-	17.559.700	0,00%	10,63%	NAN	17.559.700		1,53%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Luasan Pencegahan/Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	1.144.525.131	0,00	-	3	165.218.200	-	17.559.700	-	-	-	-	-	-	17.559.700	0,00%	10,63%	0,00	17.559.700	0,00%	4,48%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																16,64%	10,63%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		5.525.415.750	-	-		674.794.400	-	8.606.400	-	-	-	-	-	-	8.606.400	1,28%			8.606.400	0,16%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (ijin)	5.525.415.750	0,00	-	1	674.794.400	-	8.606.400	-	-	-	-	-	-	8.606.400	0,00%	1,28%	0,00	8.606.400	0,00%	0,16%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	1,28%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (%)	16,00	1.270.083.435	16,00	16	215.806.000	-	8.200.000	-	-	-	-	-	-	8.200.000	0,00%	3,80%	NAN	8.200.000	0,65%		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian (Orang)	1.270.083.435	0,00	-	30	215.806.000	-	8.200.000	-	-	-	-	-	-	8.200.000	0,00%	3,80%	0,00	8.200.000	0,00%	1,34%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																29,33%	3,80%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																						
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pendistribusian Bahan Pokok (%)	95,00	5.811.428.419	75,00	0	159.130.000	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	4.800.000	0,00%	3,02%		4.800.000	0,08%		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pendistribusian Bahan Pokok (0,8)	5.811.428.419	0,00	-	8	159.130.000	-	4.800.000	-	-	-	-	-	-	4.800.000	0,00%	3,02%	0,00	4.800.000	0,00%	1,64%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																25,00%	3,02%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pengendalian Harga Pasar (%)	95,00	10.106.857.985	75,00	0	461.817.200	-	231.292.000	-	-	-	-	-	-	231.292.000	0,00%	50,08%		231.292.000	2,29%		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga Pasar (0,8)	10.066.857.985	0,00	-	8	455.317.200	-	231.292.000	-	-	-	-	-	-	231.292.000	0,00%	50,80%	0,00	231.292.000	0,00%	2,34%	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pupuk Pestisida Bersubsidi (0,85)	40.000.000	0,00	-	85	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																48,32%	50,08%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Rendah					
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTPP yang Sesuai Standarisasi (%)	70,00	719.401.371	54,00	0	54.920.000	-	3.800.000	-	-	-	-	-	-	3.800.000	0,00%	6,92%		3.800.000	0,53%		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTPP yang sesuai Standarisasi (0,55)	719.401.371	0,00	-	55	54.920.000	-	3.800.000	-	-	-	-	-	-	3.800.000	0,00%	6,92%	0,00	3.800.000	0,00%	6,83%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																17,20%	6,92%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
PROGRAM PENGGUNAAN DALAM PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan (%)	12,52	253.709.200	10,52	0	78.690.000	-	26.605.000	-	-	-	-	-	-	26.605.000	0,00%	33,81%		26.605.000	10,49%		Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%)	253.709.200	0,00	-	12,92	78.690.000	-	26.605.000	-	-	-	-	-	-	26.605.000	0,00%	33,81%	0,00	26.605.000	0,00%	12,25%	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																48,27%	33,81%					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>																							
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial (Industri)	30,00	5.036.599.395	100,00	0	1.331.616.100	-	1.182.357.025	-	-	-	-	-	-	1.889	1.182.357.025	0,00%	88,79%	1.182.357.025	0,00%	23,48%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)	
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial (Unit Usaha)		5.036.599.395	0,00	2200	1.331.616.100	-	1.182.357.025	-	-	-	-	-	-	-	1.182.357.025	0,00%	88,79%	0,00	1.182.357.025	0,00%	61,84%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		47,67%	88,79%					
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																							
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat (%)	100,00	104.182.326.708	100,00	100	15.996.209.767	-	658.669.238	-	-	-	-	-	-	100	658.669.238	100,00%	4,12%	658.669.238	0,00%	0,63%	Sekretariat Daerah	
Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Administrasi Pemerintahan (Kegiatan)		4.801.803.573	0,00	22	1.131.942.200	-	102.621.500	-	-	-	-	-	-	-	102.621.500	0,00%	9,07%	0,00	102.621.500	0,00%	6,27%	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Kegiatan)		90.349.050.655	0,00	73	12.412.563.567	9	502.047.738	-	-	-	-	-	-	9	502.047.738	12,33%	4,04%	0,00	502.047.738	0,00%	5,12%	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah (1)		5.034.736.755	0,00	1	286.189.000	-	54.000.000	-	-	-	-	-	-	-	54.000.000	0,00%	18,87%	0,00	54.000.000	0,00%	1,84%	
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kegiatan kerjasama daerah (Kegiatan)		3.996.735.725	0,00	11	2.165.515.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		20,47%	4,12%					
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Persentase peningkatan kinerja urusan perekonomian dan pembangunan (%)	100,00	11.850.473.237	100,00	100	1.417.924.622	-	287.278.507	-	-	-	-	-	-	100	287.278.507	100,00%	20,26%	287.278.507	0,00%	2,42%	Sekretariat Daerah	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			3.078.705.226			501.837.500		86.000.013		-	-	-	-	-		86.000.013		17,14%		86.000.013		15,06%	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan (%)		1.548.163.503	0,00	1	185.967.947	-	49.990.200	-	-	-	-	-	-	-	49.990.200	0,00%	26,88%	0,00	49.990.200	0,00%	7,27%	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penggunaan Belanja E - Procurement Terhadap Belanja Pengadaan (0,9)		6.206.334.150	0,00	9	617.979.950	-	120.402.006	-	-	-	-	-	-	-	120.402.006	0,00%	19,48%	0,00	120.402.006	0,00%	5,67%	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Potensi Sumber Daya Alam Kota Palangka Raya (Dokumen)		1.017.270.358	0,00	9	112.139.225	-	30.886.288	-	-	-	-	-	-	-	30.886.288	0,00%	27,54%	0,00	30.886.288	0,00%	5,96%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		16,29%	20,26%					
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>																							
<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (Persentase)	89,20	112.661.523.666	75,00	80	20.369.597.188	-	4.441.874.738	-	-	-	-	-	-	-	4.441.874.738	0,00%	21,81%	NAN	4.441.874.738	0,00%	3,94%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	0,00		0,00	0												0,00%		NAN				
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			12.262.662.300			1.812.069.673		323.240.450		-	-	-	-	-		323.240.450		17,84%		323.240.450		12,12%	
Pembahasan Kebijakan Anggaran			13.411.161.844			1.923.480.225		615.560.277		-	-	-	-	-		615.560.277		32,00%		615.560.277		35,41%	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			31.142.098.477			3.240.940.752		1.953.163.781		-	-	-	-	-		1.953.163.781		60,27%		1.953.163.781		18,90%	
Peningkatan Kapasitas DPRD			24.968.813.815			8.444.810.600		268.596.623		-	-	-	-	-		268.596.623		3,18%		268.596.623		7,54%	
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			1.235.806.126			762.177.200		-		-	-	-	-	-		-		0,00%		-		0,00%	
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			2.711.714.517			558.610.950		168.019.738		-	-	-	-	-		168.019.738		30,08%		168.019.738		6,21%	
Pembahasan Kerja Sama Daerah			55.561.700			6.999.900		-		-	-	-	-	-		-		0,00%		-		0,00%	
Fasilitasi Tugas DPRD			26.873.704.887			3.620.507.888		1.113.293.869		-	-	-	-	-		1.113.293.869		30,75%		1.113.293.869		12,49%	
															Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		9,56%	21,81%					
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
<b>PERENCANAAN</b>																							



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah (Dokumen)			0,00		1										0,00%		0,00		0,00%			
	% Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah (%)	8,00		0,00		8		95							95	1183,88%		0,00		0,00%			
	% Tunggakan Piutang Wajib Pajak Daerah Tertagih (%)	60,00	21.998.533.171	0,00		60	3.087.475.072			356.612.871						0,00%	11,55%	0,00	356.612.871	0,00%	12,98%		
	% Wajib Pajak yang Menyeter Pajak Daerah (%)	75,00		0,00		66										0,00%		0,00		0,00%			
	% Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terealisasi (%)	98,00		0,00		98										0,00%		0,00		0,00%			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																42,90%	11,55%						
<b>Predikat Kinerja</b>																Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>KEPEGAWAIAN</b>																							
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Persentase OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Data Pegawai yang Akurat (%)	95,00	13.142.730.435	50,00		50	2.360.598.000			187.553.600						0,00%	7,95%		187.553.600	1,43%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		3.005.431.780				220.929.100			75.370.000							34,12%		75.370.000	4,81%			
	Mutasi dan Promosi ASN		4.926.400.420				1.088.042.300			3.698.000							0,34%		3.698.000	0,10%			
	Pengembangan Kompetensi ASN		4.404.082.740				973.515.200			106.835.600							10,97%		106.835.600	5,96%			
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		806.815.495				78.111.400			1.650.000							2,11%		1.650.000	0,58%			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																2,93%	7,95%						
<b>Predikat Kinerja</b>																Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>																							
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase Pejabat yang Memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan Tingkat Jabatan (%)	90,00	10.952.481.757	65,00		70	1.777.986.000			286.567.300						0,00%	16,12%		286.567.300	2,62%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	Pengembangan Kompetensi Teknis		3.645.619.389				750.145.400			265.192.300							35,35%		265.192.300	17,54%			
	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		7.306.862.368	0,00		9	1.027.840.600			21.375.000						0,00%	2,08%	0,00	21.375.000	0,00%	0,29%		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																22,60%	16,12%						
<b>Predikat Kinerja</b>																Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																							
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah (Persen)	100,00	2.750.696.813	100,00		100	959.440.059									100,00%	0,00%			0,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		417.251.500	0,00		1	14.775.000									0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		459.143.500	0,00		1	435.306.400									0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			0,00		2	203.978.000									0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		1.874.301.813	0,00		5	305.380.658									0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>																0,00%	0,00%						
<b>Predikat Kinerja</b>																Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>																							
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persen)	100,00	8.946.932.733	100,00		100	1.391.814.900			38.605.000						1,233	38.605.000	1233,00%	2,77%		38.605.000	0,43%	Inspektorat Kota

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab								
			2024	2023	2025	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025										
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan (Laporan)	7.671.187.733	0,00	-	90	1.099.004.900	-	20.440.000	-	-	-	-	-	-	20.440.000	0,00%	1,86%	0,00	20.440.000	0,00%	2,16%									
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan (Laporan)	1.275.745.000	0,00	-	62	292.810.000	-	18.165.000	-	-	-	-	-	-	18.165.000	0,00%	6,20%	0,00	18.165.000	0,00%	2,74%									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															4,44%	2,77%														
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah														
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Meningkatnya Implementasi SPIIP (%)	85,00	5.081.510.100	3,00	-	3	2.234.092.400	-	19.750.000	-	-	-	-	3	19.750.000	100,00%	0,88%	0,00	19.750.000	0,00%	0,39%	Inspektorat Kota								
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Laporan Kegiatan (Laporan)	768.239.075	0,00	-	2	79.389.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi (Laporan)	4.313.271.025	0,00	-	2	2.154.702.800	-	19.750.000	-	-	-	-	-	-	19.750.000	0,00%	0,92%	0,00	19.750.000	0,00%	0,95%									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															20,44%	0,88%														
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah														
<b>KECAMATAN</b>																														
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (IKM)	0,00		0,00	-	62,51									81	129,20%						Bukit Batu								
	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (IKM)	90,00	5.086.831.732	0,00	-	0	1.175.910.000	-	130.494.220	-	-	-	-	-	130.494.220	0,00%	11,10%	0,00	130.494.220	0,00%	2,57%									
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (1)	2.852.960.750	0,00	-	100	539.174.000	25	26.689.220	-	-	-	-	-	25	26.689.220	25,00%	4,95%	0,00	26.689.220	0,00%	0,94%									
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (1)	2.215.770.444	0,00	-	100	636.736.000	25	103.805.000	-	-	-	-	-	25	103.805.000	25,00%	16,30%	0,00	103.805.000	0,00%	4,68%									
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (1)	18.100.538	0,00	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															25,00%	11,10%														
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah														
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	0,00		100,00	-	100									100	100,00%						Bukit Batu								
	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (IKM)	90,00	7.396.841.401	0,00	-	0	1.758.936.800	-	18.980.000	-	-	-	-	-	18.980.000	0,00%	1,08%	0,00	18.980.000	0,00%	0,26%									
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan (1)	247.150.250	0,00	-	100	137.412.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%									
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan (1)	7.149.691.151	0,00	-	100	1.621.524.800	33	18.980.000	-	-	-	-	-	33	18.980.000	33,30%	1,17%	0,00	18.980.000	0,00%	19,35%									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															1,23%	1,08%														
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah														
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0,00		100,00	-	100									100	100,00%						Bukit Batu								
	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (IKM)	90,00	178.902.260	0,00	-	0	51.073.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%									
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terselenggara (Kegiatan)	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terselenggara (Kegiatan)	178.902.260	0,00	-	2	51.073.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0,00%	0,00%														
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah														

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab													
			2024	2023	2025	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025															
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Kecamatan (KM)	82,57	10.340.473.429	0,00	-	0	2.769.500.000	425.311.600	-	-	-	-	-	-	-	425.311.600	0,00%	15,36%	NAN	425.311.600	0,00%	4,11%	Jekan Raya												
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (1)		1.712.072.496	0,00	-	100	286.000.000	20	2.011.600	-	-	-	-	-	20	2.011.600	20,00%	0,70%	0,00	2.011.600	0,00%	0,12%													
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan (%)		8.564.875.333	0,00	-	20	2.472.500.000	-	423.300.000	-	-	-	-	-	-	423.300.000	0,00%	17,12%	0,00	423.300.000	0,00%	4,94%													
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat (%)		63.525.600	0,00	-	100	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%													
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>													29,47%	15,36%																					
<b>Predikat Kinerja</b>													Sangat Rendah	Sangat Rendah																					
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	66,50	5.429.177.545	0,00	-	0	1.124.252.000	117.246.000	-	-	-	-	-	-	-	117.246.000	0,00%	10,43%	NAN	117.246.000	0,00%	2,16%	Jekan Raya												
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan (1)		541.658.938	0,00	-	100	165.826.000	20	8.000.000	-	-	-	-	-	20	8.000.000	20,00%	4,82%	0,00	8.000.000	0,00%	1,48%													
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan yang ada di Perangkat Daerah (Persentase)		4.887.518.607	0,00	-	100	958.426.000	-	109.246.000	-	-	-	-	-	-	109.246.000	0,00%	11,40%	0,00	109.246.000	0,00%	21,93%													
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-													
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>													62,58%	10,43%																					
<b>Predikat Kinerja</b>													Rendah	Sangat Rendah																					
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)	66,50	804.644.300	0,00	-	0	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	NAN	-	0,00%	0,00%	Jekan Raya												
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (1)		804.644.300	0,00	-	100	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%													
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>													0,00%	0,00%																					
<b>Predikat Kinerja</b>													Sangat Rendah	Sangat Rendah																					
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (Persen)	66,00	99.605.800	0,00	-	0	26.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	NAN	-	0,00%	0,00%	Jekan Raya												
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)		99.605.800	0,00	-	100	26.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%													
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>													0,00%	0,00%																					
<b>Predikat Kinerja</b>													Sangat Rendah	Sangat Rendah																					
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Kecamatan (KM)	81,30	10.779.188.822	0,00	-	66,3	2.864.204.200	398.272.105	10.779.188.822	-	-	-	-	-	-	398.272.105	0,00%	13,91%		398.272.105	0,00%	3,69%	Pahandut												
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penilaian pelayanan kepuasan masyarakat kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan (1)		2.265.410.242	0,00	-	1	483.965.000	-	16.765.505	-	-	-	-	-	-	16.765.505	0,00%	3,46%	0,00	16.765.505	0,00%	0,74%													
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (1)		8.271.200.080	0,00	-	1	2.310.078.800	-	372.079.800	-	-	-	-	-	-	372.079.800	0,00%	16,11%	0,00	372.079.800	0,00%	4,50%													
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat (%)		242.578.500	0,00	-	1	70.160.400	-	9.426.800	-	-	-	-	-	-	9.426.800	0,00%	13,44%	0,00	9.426.800	0,00%	16,40%													
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>													20,50%	13,91%																					
<b>Predikat Kinerja</b>													Sangat Rendah	Sangat Rendah																					

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	
		30.20	8.061.975.273	0,00	-	29	2.206.278.400	93.991.600	-	-	-	-	-	-	33	93.991.600	113,79%	4,26%	NAN	93.991.600	0,00%	1,17%			
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Terpenuhi Hasil Dana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	30,20	8.061.975.273	0,00	-	29	2.206.278.400	93.991.600	-	-	-	-	-	-	33	93.991.600	113,79%	4,26%	NAN	93.991.600	0,00%	1,17%	Pahandut		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan pada perangkat daerah (Kegiatan)		526.140.480	0,00	-	4	688.778.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (1)		7.535.834.793	0,00	-	1	1.517.500.000	-	93.991.600	-	-	-	-	-	-	93.991.600	0,00%	6,19%	0,00	93.991.600	0,00%	23,41%			
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	2,49%	4,26%						
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100,00	449.370.100	0,00	-	100	72.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	NAN	-	0,00%	0,00%	Pahandut		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)		449.370.100	0,00	-	1	72.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%						
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Hasil IKM pelayanan publik Kecamatan (Indeks)	83,00	2.275.524.407	0,00	-	76,35	501.786.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		-	0,00%	0,00%	Rakumpit		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2.132.613.307				423.418.200											0,00%				0,00%			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			142.911.100				78.368.200											0,00%				0,00%			
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%						
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah (%)	100,00	8.700.801.300	0,00	-	100	1.912.054.000	49.094.000	-	-	-	-	-	-	49.094.000	0,00%	2,57%		49.094.000		0,56%		Rakumpit		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.700.801.300				1.912.054.000	49.094.000							49.094.000		2,57%		49.094.000		25,76%				
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	26,78%	2,57%						
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0,00		0,00	-	100									100	100,00%							Rakumpit		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pemeruan layanan kepada masyarakat yang sesuai SOP Urusan Pemerintahan Umum (Persentase)	83,00	54.660.000	0,00	-	0	32.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%				0,00%				
			54.660.000				32.040.000										0,00%				0,00%				
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%						
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (IKM)	81,50		0,00	-	66,3											0,00%						Sabangau		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (IKM)	81,50	5.089.030.132	0,00	-	0	1.319.533.300	132.180.000							132.180.000		10,02%		132.180.000		2,60%				
			5.089.030.132				1.319.533.300	132.180.000							132.180.000		10,02%		132.180.000		2,60%				
																	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%						
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (IKM)	81,50		0,00	-	66,3											0,00%						Sabangau		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (laporan)		2.186.819.476	0,00	-	7	432.693.200	2	-	-	-	-	-	-	1	-	7,14%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
			2.186.819.476				432.693.200	2							1		7,14%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab								
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan Prosentase Pelaksanaan Tugas Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Wilayah Kecamatan (Kegiatan 100 %)	2.861.740.030	0,00	-	2	873.360.000	1	132.180.000	-	-	-	-	-	0	132.180.000	12,50%	15,13%	0,00	132.180.000	0,00%	4,62%								
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dilaksanakan (Kegiatan)	-	0,00	-	1	1.772.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan (Kegiatan)	40.470.626	0,00	-	2	11.707.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															49,02%	10,02%													
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah													
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Terpenuhi Hasil Dana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	21,00	0,00	-	21	1.295.871.200		97.591.100							97.591.100	0,00%	7,53%		97.591.100		1,46%	Sabangau							
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Persen)	81,50	0,00	-	0											0,00%													
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kegiatan)	-	0,00	-	1	20.163.800	1	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan (Kegiatan)	6.518.099.019	0,00	-	3	1.204.151.300	2	97.591.100	-	-	-	-	-	2	97.591.100	66,67%	8,10%	0,00	97.591.100	0,00%	2,50%								
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Keluarga)	183.430.200	0,00	-	6	71.556.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															68,72%	7,53%													
Predikat Kinerja															Sedang	Sangat Rendah													
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Kertertiban Umum (Kegiatan)	100,00	435.099.938	0,00	0	6.002.200		-							-	0,00%	0,00%		-	0,00%		Sabangau							
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kertertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan kertertiban (Kegiatan)	425.099.938	0,00	-	1	3.009.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerimaan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	10.000.000	0,00	-	1	2.993.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0,00%	0,00%													
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah													
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100,00	0,00	-	100	60.803.400		-							-	0,00%			-	0,00%		Sabangau							
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (persen)	81,50	109.450.512	0,00	0	60.803.400		-							-	0,00%			-	0,00%									
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan (Kegiatan)	109.450.512	0,00	-	4	60.803.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															0,00%	0,00%													





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahunan sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang – Undangan dilaksanakan dalam rangka menjamin keberhasilan capaian pembangunan daerah. Hasil pelaksanaan evaluasi diharapkan memberikan feedback bagi peningkatan kualitas penyusunan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Untuk akhir tahun semua kegiatan sudah terlaksana sesuai target yang dibuat. Walaupun masih terdapat sisa anggaran tahun 2025. Sisa anggaran ini pada umumnya terdapat pada sub kegiatan gaji dan tunjangan ASN.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 maka dapat disimpulkan sampai dengan akhir Bulan Maret 2025 posisi capaian kinerja perangkat daerah secara akumulatif se Kota Palangka Raya untuk realisasi kinerja yang mencapai 17,21 %, dengan realisasi keuangan sebesar 12,75 %. Capaian kinerja dan capaian keuangan dikategorikan dengan predikat Sangat Rendah.

#### **4.2. Rekomendasi**

1. Dalam rangka meningkatkan keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan, maka penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja Perangkat Daerah dan RKPD) dan Penganggaran (APBD) perlu memperhatikan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.



2. Perlu dilaksanakan monitoring secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah OPD dan Kecamatan dapat cepat diketahui sehingga kedepan dalam proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah dan RKPD agar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan dokumen perencanaan terkait Pengisian form Evaluasi pada aplikasi e Monev.

Dokumen hasil evaluasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan sebagai feed back dalam penyusunan dokumen perencanaan dan dalam merencanakan penganggaran untuk tahun anggaran selanjutnya serta untuk dijadikan instrumen pengendalian pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran berjalan.

Palangka Raya,            April 2025

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan, Riset dan Inovasi  
Daerah Kota Palangka Raya,

**Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19750317 199903 1 005